

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG
TERHADAP PEMBANGUNAN KAMPUNG
(STUDI KASUS PADA KAMPUNG ASAI DISTRIK WINDESI
PERIODE 2015-2016)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ASER PONGRATTE

NIM. 501037894

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017**

ABSTRACT**Implementation of Village Fund Policy on Village Development
(Case Study On Asai Village Windesi District period 2015-2016)**

ASER PONGRATTE
Pongrate07@gmail.com.

Graduate studies Program
Indonesia Open University

The objectives of this research are 1) To analyze the implementation of village fund policy towards the development of Asai village in Windesi district. The 2nd objective is to analyze the factors influencing the implementation of village fund policy towards the development of Asai village in Windesi district. Analysis of policy implementation using the implementation theory according to Van Meter and Van Horn. The approach used in this research is qualitative research. Techniques of data collection using interviews, documentation, and observation. The research instrument is in the form of an interview guide which is used to obtain information from the key informants, namely the head of Kampung, the treasurer, the Chairman of Bamuskam (Deliberation Council village), the Windesi district secretary, the District Government Assistant of the District of Yapen Islands, and the P3MD (Village Community Empowerment Development Program) Kepulauan Yapen District. Data analysis using inductive descriptive technique. The results of this study found that the implementation of village fund policy for the development of Asai village is considered to be well realized. 53.84% of *Village Fund Allocation* is used for the operational of the village apparatus, while the rest is used for physical, socio-cultural and economic development. Factors influencing the implementation of the village fund policy for the development of Asai village (a) the existence of clear and measurable standards and policy targets, and has been well socialized, (b) the availability of resources, especially capital and infrastructure, while from the human resources side still need many improvements, particularly in the case of LPJs (c) established good cooperation between governmental organizations, (d) implementing agencies that are less consistent and potentially misleading if not properly supervised, (e) mutually supportive social and political conditions, and (f) excellent disposition of the implementer and a positive understanding of the urgency of *Village Fund Allocation*

Keywords : *Village Fund Policy, Village Development, Village Fund Allocation*

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung (Studi Kasus Pada Kampung Asai Distrik Windesi Periode 2015-2016)

ASER PONGRATTE
Pongrate07@gmail.com.

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi. Tujuan yang ke 2) adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian berbentuk panduan wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari *key informan*, yaitu kepala Kampung, bendahara, Ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung), sekretaris distrik Windesi, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan pendamping P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Kepulauan Yapen. Analisis data menggunakan teknis deskriptif induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai dinilai telah terealisasi dengan baik Sebanyak 53,84% dari Dana Kampung digunakan untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai adalah (a) adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, serta telah disosialisasikan dengan baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak perbaikan, utamanya dalam masalah LPJ (c) terjalin kerja sama yang baik antar organisasi pemerintahan, (d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (e) kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana kampung.

Kata Kunci: Kebijakan Dana Kampung, Pembangunan Kampung, Alokasi Dana Kampung

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung (Studi Kasus Pada Kampung Asai Distrik Windesi periode 2015-2016) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, 19 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Aser Pongratte
NIM: 501037894

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap
Pembangunan Kampung (Studi Kasus Pada Kampung
Asai Distrik Windesi Periode 2015 - 2016)

Penyusun TAPM : Aser Pongratte

NIM : 501037894

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2017

Menyetujui :

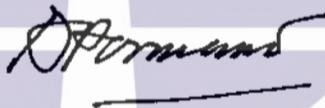
Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. R. BENNY A. PRIBADI, M.Si
NIP. 19610509 198703 1 001


Dr. YOSEPHINA OHOIWUTUN, M.Si
NIP. 19610618 198902 2 001

Penguji Ahli


Prof. DJAKA PERMANA, M.Si, Ph.D
NIP. 130319673

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Pascasarjana

Direktur
Program Pascasarjana


Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. LIESTYODONO BAWONO IRIANTO, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Aser Pongratte
 NIM : 501037894
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap
 Pembangunan Kampung (Studi Kasus Pada Kampung
 Asai Distrik Windesi Periode 2015 - 2016)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 19 Agustus 2017

W a k t u : 11.00 Wit s/d 12.30 Wit

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Dr. Sardjijo, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli
 Prof. Djaka Permana, M.Si, Ph.D

Pembimbing I
 Dr. Yosephina Ohoiwutun, M.Si

Pembimbing II
 Dr. R.Benny A. Pribadi, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka
4. Dr. Sardjijo, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Jayapura.
5. Dr. Yoshepina Ohoiwutun, M.Si selaku Dosen Pembimbing I bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan Tesis ini.
6. Dr. R. Benny A. Pribadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan Tesis ini.

7. Seluruh dosen UT UPBBJ Jayapura kelas Serui yang setia memberikan ilmunya dari semester I sampai dengan semester IV.
8. Ayahanda (S.B. Pongratte) dan Ibunda tercinta (Helena Patasik), Istriku (Herlina L.Y. Mirino, SE), dan Anak – anak tersayang (Angelin, Gabriel dan Michelle) dan sanak Keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan dan menyelesaikan TAPM;
9. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Bpk. Drs. Drofiluas Yan Lestuni) yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan informasi dan data dalam penyusunan TAPM ini;
10. Sekretaris Distrik Windesi (Bpk. Aldius E. Kanggunum, S.STP) yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi serta data-data pendukung dalam penyelesaian TAPM ini;
11. Kepala Kampung Asai (Bpk. Kundrat Raubia), Ketua BAMUSKAM (Bpk. Benyamin Puari), Bendahara Kampung (Bpk. Anton Maniamboi) dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Bpk. Frans Jerys dan Bpk. Vecky Allan Modok yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya dalam menghimpun data dan informasi dalam penyelesaian TAPM ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa PPs UT kelas Serui yang selalu memberikan motivasi dan masukan selama penyusunan TAPM ini berlangsung;

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan yang telah dicurahkan oleh semua pihak dan juga menjadi berkat bagi sesamanya.

Pada Akhirnya penulis menyadari keterbatasannya sebagai makhluk yang tidak pernah lepas dari kekhilaafan dan kesalahan, dengan kerendahan hati kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan juga kepada semua pihak yang membacanya.

Jayapura, 18 Agustus 2017
Penulis

Aser Pongratte
NIM. 501037894



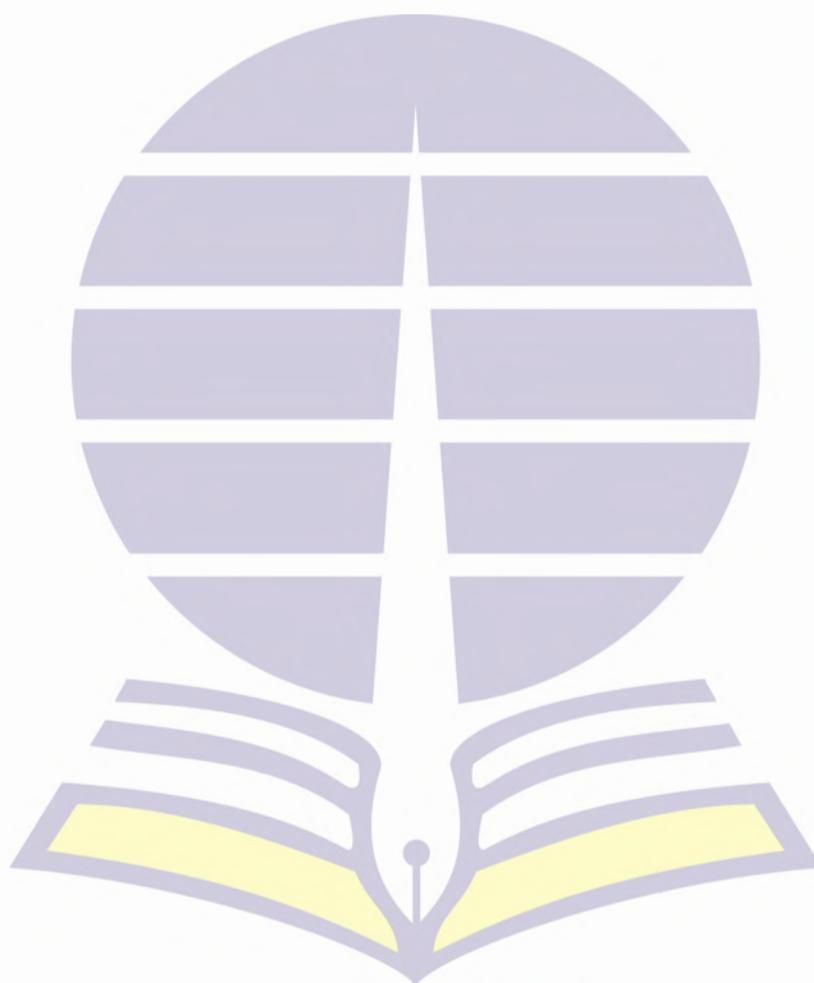
RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Aser Pongratte
NIM : 501037894
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat Tanggal Lahir : Serui, 7 Agustus 1976
- Riwayat Pendidikan** :
 1. Lulus SD di Serui pada Tahun 1989
 2. Lulus SLTP di Serui pada Tahun 1992
 3. Lulus SMU di Serui pada Tahun 1995
 4. Lulus Diploma IV setara S1 di Jatinangor Bandung pada Tahun 1999
- Riwayat Pekerjaan** :
 1. Tahun 1999 s/d 2001 ditempatkan sebagai ADC Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen;
 2. Tahun 2001 s/d 2009 melaksanakan jabatan Kepala Sub Bagian Perangkat Desa Pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
 3. Tahun 2009 s/d 2013 melaksanakan Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan dan pendapatan kekayaan kampung Pemberdayaan Pemerintahan Kampung pada BPMPK Kabupaten Kepulauan Yapen;
 4. Tahun 2013 s/d 2016 melaksanakan Jabatan kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kampung pada BPMPK Kabupaten Kepulauan Yapen.

5. Tahun 2016 s/d Sekarang melaksanakan
Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan
Kampung pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen.

Jayapura, 18 Agustus 2017

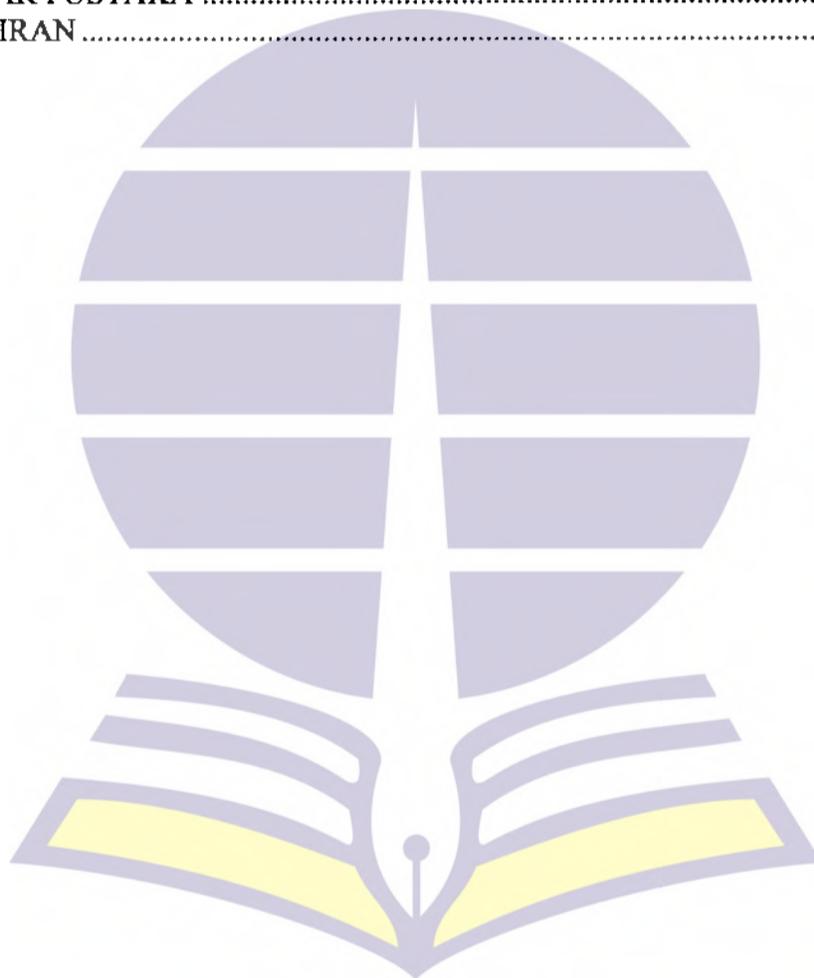
Aser Pongratte
NIM. 501037894



DAFTAR ISI

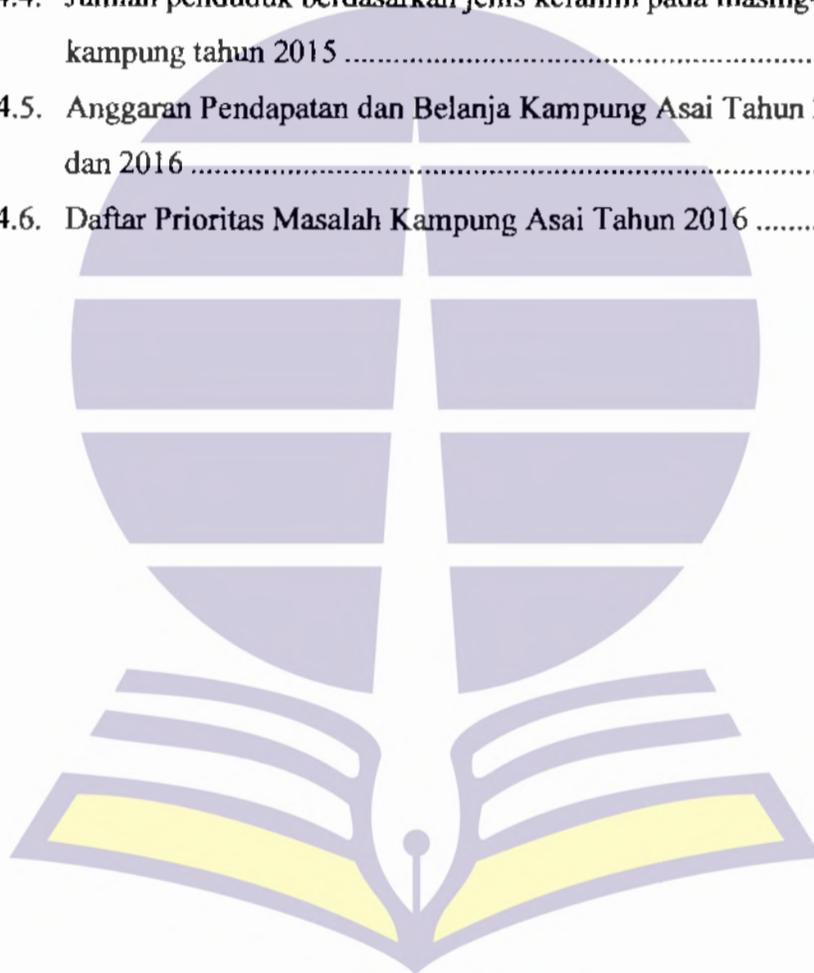
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BIODATA PENELITI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Proses Kebijakan Publik.....	21
3. Implementasi Kebijakan Publik	22
4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik.....	26
5. Konsep kampung	27
6. Keuangan Desa.....	30
7. Dana Kampung.....	Error! Bookmark not defined.
8. Konsep Pembangunan	34
9. Pembangunan Kampung.....	36
10. Operasional Konsep.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Konsep Pemikiran.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan atau Desain Penelitian.....	50
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	51
D. Prosedur Penelitian.....	52
E. Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Metode Analisa Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen	57
2. Gambaran Umum Distrik Windesi.....	60
3. Gambaran Umum Kampung Asai	62
4. Rencana Program Pengembangan Kampung	65
5. Struktur Pemerintah Kampung Asai.....	67
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun Anggaran 2015 dan 2016	69
B. Hasil Penelitian	72
C. Pembahasan	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	104
A. Simpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	111



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dana Kampung pada 9 Kampung Distrik Windesi Tahun 2015 dan 2016	8
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 4.1. Banyaknya Kelurahan dan Kampung serta Luas Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015.....	58
Tabel 4.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015.....	59
Tabel 4.3. Nama Kampung dan Status Pemerintahan Distrik Windesi Tahun 2015	61
Tabel 4.4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kampung tahun 2015	62
Tabel 4.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun 2015 dan 2016	69
Tabel 4.6. Daftar Prioritas Masalah Kampung Asai Tahun 2016	71



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Model Implementasi Menurut G. C. Edward III.....	24
Gambar 2.2. Kerangka Konsep Pemikiran	49
Gambar 4.1. Struktur Pemerintah Kampung Asai	68



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Panduan Wawancara	112
Lampiran II. Hasil Wawancara Dengan Kepala Kampung	115
Lampiran III Hasil Wawancara Dengan BAMUSKAM	123
Lampiran IV Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Distrik Windesi	130
Lampiran V Hasil Wawancara Dengan Bendahara Kampung	139
Lampiran VI Hasil Wawancara Dengan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen ...	149
Lampiran VII Hasil Wawancara Dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen	158
Lampiran IX. Hasil Wawancara Dengan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen	170



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sasaran Pembangunan Nasional yang digalakkan oleh Pemerintah berupaya untuk mendorong adanya pemerataan pembangunan di daerah perkotaan dan pedesaan yang selaras dan seimbang. Upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih banyak masalah yang dihadapi. Masalah yang ada pada akhirnya berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Menurut data BPS (2016), jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 semester I wilayah perkotaan adalah sebesar 7,79% dan wilayah pedesaan sebesar 14,11%. Kemudian secara khusus di wilayah Provinsi Papua, ketimpangan tersebut terlihat lebih jelas dimana penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 4,42%, sedangkan wilayah pedesaan sebesar 37,14%. Artinya jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua yang tidak di pedesaan hampir sembilan kali lipat dibanding penduduk miskin di wilayah perkotaan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki strategi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Salah satu perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan khususnya pembangunan desa adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya undang-undang tersebut menandai

dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai wilayah administratif desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola potensi yang ada di desa sebagai wujud tanggungjawab mereka sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan berinisiatif, sehingga mampu menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. UU tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan.

Pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam pembangunan desa, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Guna mewujudkan pembangunan desa maka pemerintahan desa membutuhkan sumber pendapatan desa sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan desa. Menurut Putra,

dkk (2013), beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Kampung. Lewat dana kampung tersebut diharap dapat memberikan angin segar bagi pemerintah desa dalam merencanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat desa menuju masyarakat yang demokratis, maju, mandiri dan sejahtera. Dana Kampung diharapkan dapat menggerakkan perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) yang berbasis musyawarah guna mengalih usulan-usulan program pembangunan untuk kepentingan umum. Pemberian Dana Kampung yang bersumber dari APBN menimbulkan pertanyaan dan

kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur dalam merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan dikarenakan selama ini desa tidak diberikan dana secara langsung untuk dikelola sendiri, sedangkan Dana Kampung langsung dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal lain yang ditakutkan adalah jangan sampai Dana Kampung tidak diperuntukkan berdasarkan peraturan Menteri Desa dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Prioritas penggunaan Dana Kampung tahun 2015, sehingga dapat terjadinya korupsi di tingkat desa. Tidak bisa di pungkiri bahwa pemerintah desa pada umumnya mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak sama antar desa yang satu dengan yang lain tetapi pada umumnya kelemahan tersebut diantaranya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang sangat rendah dengan tingkat pendidikan yang rata-rata tamatan SLTP; sarana dan prasarana penunjang roda pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terbatas sehingga mengganggu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa serta berdampak penurunan motivasi dan kinerja dari aparat pemerintah desa; rendahnya kualitas aparat pemerintah kampung dalam merumuskan dan merencanakan program kegiatan dalam rangka menyelaraskan output dan input sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat; serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang desa sangat efektif karena tidak sekedar terbit tetapi langsung diikuti dengan perangkat-perangkat hukum yang

memadai sebagai landasan pelaksanaannya disertai dengan anggarannya, diantaranya PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Guna menindaklanjuti peraturan Pemerintah tersebut maka diterbitkan aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Kampung.

Menanggapi urgensi Dana Kampung bagi kesuksesan pembangunan kampung, pemerintah pusat mengalokasikan sebagai dari dana APBN yang dibagikan secara proporsional kepada 32 provinsi di Indonesia. Dari total Dana Kampung sebesar 46,9 triliun rupiah yang diberikan pada tahun 2016, Provinsi Papua mendapatkan Dana Kampung sebesar 3,3 Triliun Rupiah yang dibagikan secara proporsional pada 29 Kabupaten/Kota. Alokasi dasar pembagiannya adalah per desa memperoleh Dana Kampung sebesar 565.640.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) di tahun 2016. Berdasarkan asumsi tersebut, Kabupaten Kepulauan Yapen di tahun 2016 memperoleh Dana Kampung sebesar Rp. 96.273.040.000,- (*Sembilan Puluh Enam Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Empat puluh Ribu rupiah*) yang meningkat hampir 100% dari tahun 2015 sebesar Rp. 42.916.866.000,-

(Empat Puluh Dua Milyard Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Kebijakan Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua mulai berlaku efektif pada tahun 2015 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada Setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung. Pasal 6 Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2015 berbunyi, Dana Kampung diprioritaskan untuk:

1. Membiayai pembangunan masyarakat yang meliputi :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana kampung.
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Membiayai pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas proses perencanaan kampung.
 - b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM kampung maupun oleh kelompok usaha masyarakat lainnya.
 - c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan memfasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat kampung.

- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- f. Dukungan terhadap kegiatan kampung dan masyarakat pengelola hutan kampung dan hutan kemasyarakatan; dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Kampung tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 BAB II pasal 3, Nomor 21 tahun 2015 BAB III Pasal 4 dan Nomor 22 Tahun 2016 BAB III Pasal 4. Prioritas penggunaan Dana Kampung dapat implementasi oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, serta dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga dan kelompok masyarakat dan desa. Pemberian Dana Kampung oleh pemerintah pusat diharapkan menjadi perangsang (stimulan) dalam membiayai program-program pemerintah desa sehingga menggerakkan tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam program pembangunan dan pemherdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sesuai pasal 3 Permendes No.22 Tahun 2016 didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.

2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipasi, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan pikiran, tenaga dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Meninjau implementasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Kampung Asai Distrik Windesi adalah salah satu kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen yang berada di daerah pesisir sebelah barat daya pulau Yapen, dimana masyarakatnya masih homogen dengan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan dan petani. Penyelenggaraan Pemerintahan kampung asai berjalan dengan baik, dengan mengandalkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Jumlah dana kampung pada distrik Windesi tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1.
Dana Kampung pada 9 Kampung Distrik Windesi Tahun 2015 dan 2016

No	Kampung	Dana Kampung 2015	Dana Kampung 2016
1.	Kaonda	254.760.900,-	601.120.039,-
2.	Windesi	253.576.936,-	599.494.628,-
3.	Munggui	255.382.069,-	619.635.259,-
4.	Karawi	259.444.816,-	616.071.378,-
5.	Asai	254.071.720,-	600.195.658,-
6.	Rosbori	254.847.932,-	605.233.279,-
7.	Waisani	259.188.195,-	623.782.913,-
8.	Saruman	256.385.878,-	608.339.299,-
9.	Aryobu	254.591.792,-	601.503.023,-
Jumlah Total		2.302.250.238,-	5.475.375.476,-

Sumber : Perbup No. 4 Tahun 2015 dan Perbup 5 Tahun 2015

Dari tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa kampung Asai menerima Dana Kampung tahun 2015 sebesar Rp. 254.071.720,-, sedangkan tahun 2016 menerima Dana Kampung sebesar Rp. 600.195.658,- yang penggunaannya diperuntukkan untuk membiayai bidang pemerintahan kampung, bidang pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan masyarakat kampung dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kampung Asai bersama Badan Musyawarah Kampung istimewa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah kampung 6 (enam) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Kampung tahun 2015 dan Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung tahun 2015. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat yang rendah serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kampung Asai.

Sejalan dengan permasalahan tersebut melalui pemerintah daerah (SKPD) terkait telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen-dokumen pelaksanaan dana kampung tersebut, sehingga pemerintah kampung asai telah memiliki dokumen RPMJK, RKPK dan APBK tahun 2015 dan tahun 2016. Keuangan kampung yang disusun untuk satu tahun anggaran baik 2015 dan 2016 merupakan hasil musyawarah kampung dengan gagasan dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat kampung sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan atau dilaksanakan di kampung asai. Bidang pembangunan kampung tahun 2015 dan tahun 2016 pemerintah kampung Asai telah membangun beberapa bangunan rumah, balai kampung dan memberikan bantuan pembangunan bahan bangunan rumah kepada warga masyarakat dalam bentuk stimulan guna mengerakkan tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat untuk membangun dan merenovasi tempat tinggal mereka yang jauh dari standar kelayakan.

Terlepas dari keberhasilan Kampung Asai dalam memanfaatkan dana kampung untuk pembangunan fisik, masih dibutuhkan kajian lebih mendalam terkait implementasi dana tersebut dalam menopang pembangunan kampung tersebut. Kajian ini menjadi penting mengingat bahwa keberhasilan pembangunan kampung tidak hanya didasarkan pada keberhasilan pembangunan fisik infrastruktur saja, namun dari sisi pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya juga tidak kalah penting sehingga tujuan utama dari pembangunan dapat tercapai. Terlebih, dengan keterbatasan sarana dan prasarana, teknologi, dan sumber daya manusia yang dimungkinkan dapat menghambat proses pembangunan di kampung Asai.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Dana Kampung , dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung (Studi Kasus Pada Kampung Asai Distrik Windesi Periode Tahun 2015-2016)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang implementasi kebijakan dana kampung dalam mendorong pembangunan di daerah, khususnya di wilayah kampung Asai distrik Windesi.

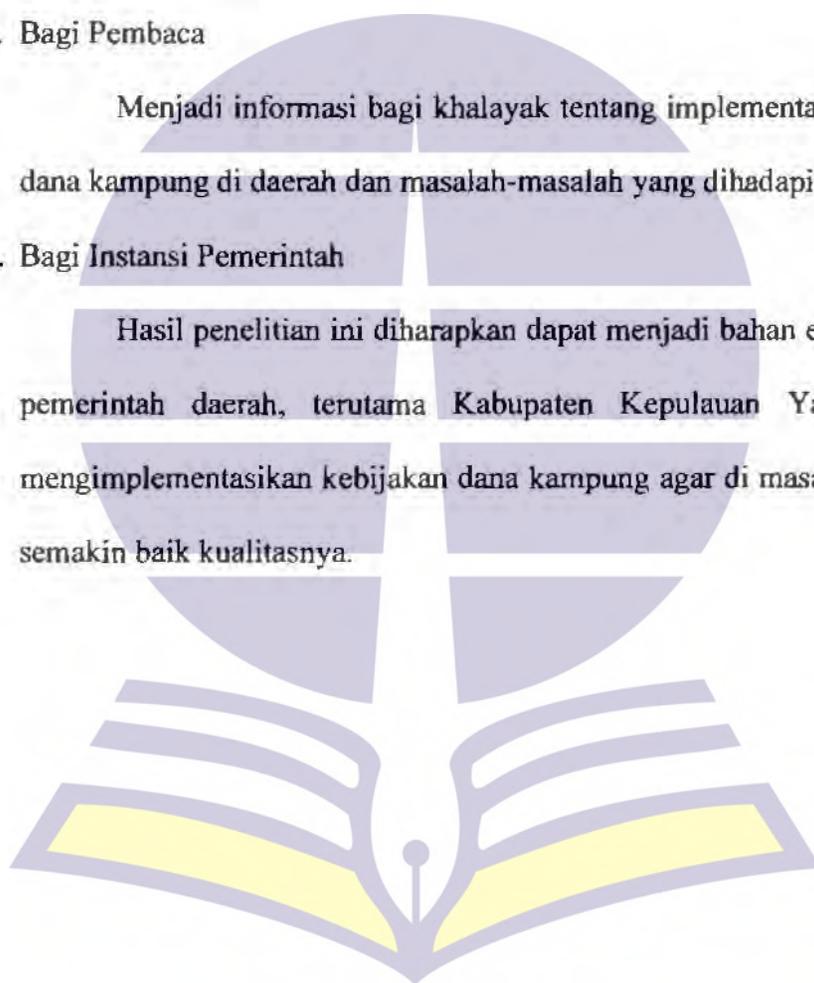
2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Menjadi informasi bagi khalayak tentang implementasi kebijakan dana kampung di daerah dan masalah-masalah yang dihadapi.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengimplementasikan kebijakan dana kampung agar di masa mendatang semakin baik kualitasnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Hambali dan Maghfur (2015) dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi Birokrasi Publik menjelaskan bahwa

Kata “administrasi” yang dikenal di Indonesia saat ini berasal dari kata administrasi (Latin: *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti memberikan pelayanan kepada. Kata administrasi juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata “administrasi” juga dapat berasal bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (sumber daya manusia).

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan untuk mengelola dan menggerakkan. Adapun publik menurut Syafi’ie (dalam Pasolong, 2011) adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Keban (2008) menyatakan bahwa istilah administrasi publik sebagai berikut:

Bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena di asumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang

mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

b. Unsur Administrasi

Unsur-unsur administrasi menurut Anggara (2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
- 2) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja. Meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengordinasian, pengawasan, penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
- 3) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
- 4) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai yang diperlukan.
- 5) Keuangan, yaitu pengolahan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
- 7) Tata Usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
- 8) Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

c. Ciri Administrasi Publik

Ciri-ciri administrasi publik menurut Thoha (2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi publik adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi publik. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi publik, baik warga negara ataupun orang asing.
- 2) Administrasi publik memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- 3) Administrasi publik mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi publik. Dari sekian banyaknya tersebut

tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- 4) Administrasi publik mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- 5) Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi publik dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan administrasi publik adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi publik sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- 7) Banyak yang diharapkan dari administrasi publik. Hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi publik berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi publik mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

2. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Terdapat beberapa pengertian yang tentang keuangan daerah.

Diantaranya adalah Basuki (2007) yang mengatakan bahwa keuangan daerah adalah

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sementara itu Mamasah sebagaimana dikutip oleh Halim (2007) keuangan daerah adalah

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh

negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2007) yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain dan atau untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat meningkatkan kekayaan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban untuk menggunakan sumber penerimaan daerah uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi, kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah

b. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Rahman (2005) adalah sebagai berikut:

Pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sementara itu Menurut Warsito (2001) pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah atau yang biasa dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah diuraian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Sunarto (2005) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Sementara itu menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah selanjutnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Yani (2009) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Aji dkk (2015) mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

4) Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004) pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Jenis pendapatan ini meliputi 1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah.

Selain dari PAD sumber pendapatan daerah juga dapat bersumber dari dana perimbangan. Dana Perimbangan menurut Darise (2007) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

1) Dana Bagi Hasil

Menurut Nordiawan (2007) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bastian (2003) DAU adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sementara itu Menurut Nordiawan dkk (2008) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK menurut Darise (2009) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Suatu kebijakan digolongkan sebagai kebijakan publik karena kebijakan tersebut berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Selain dihasilkan oleh organisasi publik yang berwenang, suatu kebijakan juga dikatakan sebagai kebijakan publik dikarenakan lingkup isu atau masalahnya mencakup kepentingan umum.

Federick dalam Agustino (2014) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Beberapa hal yang pokok dalam suatu kebijakan, yaitu adanya: a) tujuan (*goal*), b) sasaran (*objectives*), dan c) kehendak (*purpose*).

Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Eyestone dalam Agustino (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Anderson dalam Nurcholis (2005) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*).

Dye dalam Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama) dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

4. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses yang harus dikaji. Beberapa ahli yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Menurut Howlet dan Ramesh dalam Nawawi (2009), proses kebijakan publik terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mampu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut Webster dalam Widodo (2010), implementasi kebijakan publik dinyatakan sebagai “to implement” (mengimplementasikan) yang mempunyai pengertian *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

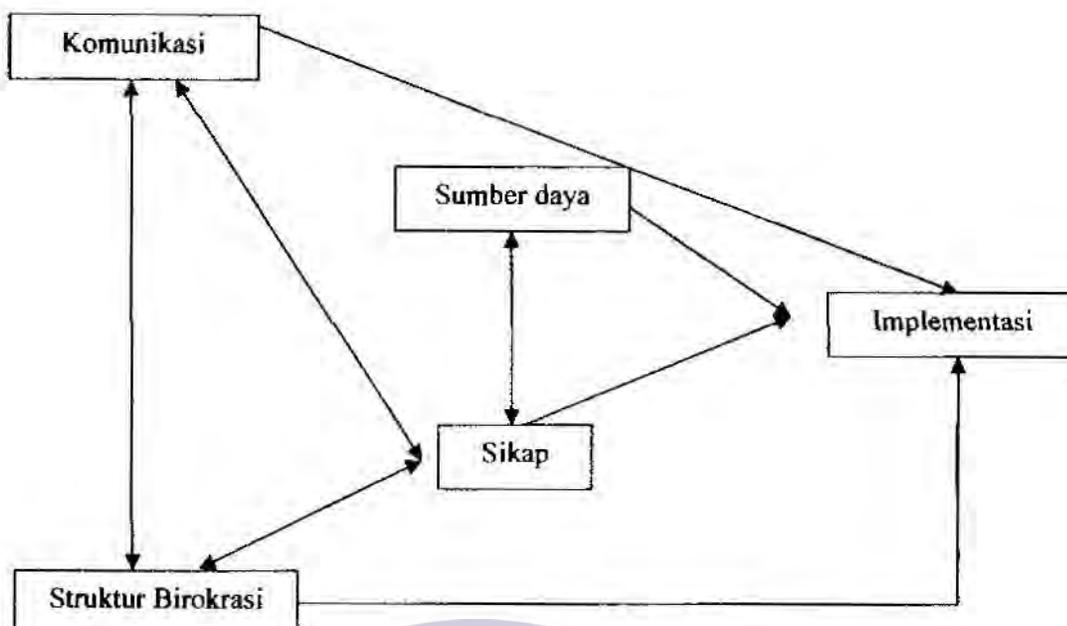
Mazmanian dan Sabatier dalam Waluyo (2007) menambahkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Edwards dalam Nawawi (2009), terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu :

- a. Komunikasi, yaitu Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas
- b. Sumber daya, yaitu dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material, dan metode.
- c. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis.
- d. Struktur birokrasi, yaitu dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Menurut George C. Edward III dalam Subarno (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi, dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini :





Gambar 2.1. Model Implementasi Menurut G. C. Edward III

Sumber : Subarsono (2005:91)

Model implementasi kebijakan lainnya adalah Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2006) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- b. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan

instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Menurut Wisakti (2008), implementasi kebijakan publik dapat diamati dari fenomena-fenomena berikut:

- a. Proses Implementasi Kebijakan, meliputi :
 - 1) Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - 2) Penyelesaian kegiatan dana kampung
 - 3) Pertanggungjawaban Kegiatan dana kampung

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

6. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010), kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

a. Tujuan yang akan dicapai.

Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

c. Sumber daya yang mendukung kebijakan.

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam hidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

e. Lingkungan

Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis

7. Konsep Desa/kampung

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Herman Warner Muntinghe, seorang belanda yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa tahun 1811 di Indonesia. Menurut Soetardjo (1984) (dalam Wasistiono dan Irwan, 2007:7), kata “desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Lebih lanjut, Bintarto (dalam Wasistiono dan Irwan, 2007:8) memberikan definisi desa dari segi geografi, yaitu suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Kemudian Bouman (dalam Wasistiono dan Irwan, 2007:8) mendefinisikan desa dari pergaulan hidup sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa ciri dari desa yang paling utama adalah sebagai tempat tinggal, tempat melakukan aktifitas dan interaksi diantara kelompok, dan adanya tradisi dan budaya. Lainnya halnya pendapat dari Widjaja (2004) yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di bawah kabupaten. Lebih lanjut, Widjaja (2004) mengatakan bahwa landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian perangkat daerah. Berbeda dengan

kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayah lebih luas. Lebih lanjut, Zakaria dalam Sumpeno (2011) juga mengungkapkan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Ada empat tipe desa di Indonesia menurut Nurcholis (2011) yaitu sebagai berikut:

1) Desa Adat

Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara.

2) Desa Administrasi

Desa administrasi merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.

3) Desa Otonom

Desa otonom merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

4) Desa Campuran

Desa campuran merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

8. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Agus, 2015). Desa membutuhkan pendanaan dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga keuangan desa harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa menurut Agus (2015) adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dilihat dari sifatnya, pengelolaan keuangan desa menurut Soleh dan Rochmansjah (2014) dibagi menjadi keuangan kampung yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan keuangan kampung yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Pengelolaan keuangan kampung dilakukan secara tidak langsung atau terpisah dimaksudkan bukan saja untuk menjadi motor penggerak roda-roda perekonomian kampung tetapi juga dimaksudkan sebagai sumber pendapatan kampung.

Sutiono (2015) menyatakan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa (PADes), yang terdiri dari
 - 1) Hasil usaha
 - 2) Hasil aset
 - 3) Swadaya dan partisipasi
 - 4) Gotong royong
 - 5) Lain-lain PADes
- b. Alokasi APBN (Dana Kampung)

Pemerintah mengalokasikan Dana Kampung dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
Pemkab/pemkot mengalokasikan bagian hasil dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.
- d. Alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pemkab dan pemkot mengalokasikan dana kampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi DAK. Pengalokasian dana kampung mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemprov dan Pemkab atau pemkot dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain PADes
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari

belanja pegawai, barang dan modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan minimal 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta digunakan minimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

9. Dana Desa/Kampung

Upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah urbanisasi dari kampung ke kota adalah pemberian otonomi kampung bagi kampung-kampung dengan penyediaan dana yang memadai untuk membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Menurut Sanusi dkk (2014) Dana Kampung adalah

dana yang harus dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operator dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Kampung merupakan wujud pengakuan (*recognition*) pemerintah/negara kepada desa berdasarkan kewenangan berupa hak-haknya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi kampung, maka sudah sewajarnya kampung memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangan tersebut dan sekaligus untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Pentingnya pemberian anggaran kepada

kampung ini dilakukan mengingat bahwa pemerintahan kampung tidak akan dapat melaksanakan kewenangan dan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup. Selama ini pembangunan kampung masih banyak bergantung dari bantuan dana Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk program-program yang langsung mengarah ke kampung, pendapatan asli desa (bagi kampung diluar Papua) dan swadaya masyarakat yang jumlahnya relatif kecil dan tidak dapat di estimasi.

Menurut Sahdan dkk (2004) Dana Kampung merupakan bentuk responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup: (1) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (2) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undan; (3) kewenangan delegatif administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Dana Kampung menurut Nurcholis (2011) memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh persen)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20 % (dua puluh persen)

Kemudian untuk Dana Kampung tahun anggaran 2016 pengirimannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Tahap I pada Bulan April sebesar 60% (enam puluh persen)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);

Dana Kampung dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dimana APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

10. Konsep Pembangunan

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakat Indonesia otomatis menjadi beragam pula. Sehingga hal tersebut berdampak kepada pembangunan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lewat kondisi tersebut, maka bangsa Indonesia mewarisi permasalahan yang rumit. *Pertama*, menyangkut masalah jumlah penduduk miskin yang sangat besar, yang terpusat di pulau Jawa. *Kedua*, perkembangan pembangunan yang berbeda antara Jawa dan diluar Jawa.

Ketiga, kemampuan aparat birokrasi yang masih rendah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kebijakan pemerintahan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pengembangan wilayah, namun pada saat pelaksanaan pembangunan, pemerintah dihadapkan pada persoalan lain yaitu aparat pelaksana pembangunan.

Menurut Chalid (2014), tiga permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan yaitu: (1) rendahnya kemampuan teknis para pelaksana pembangunan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan wilayah, (2) wawasan sektoral yang masih kuat berakar dalam instansi pemerintah yang melaksanakan pembangunan, dan (3) sikap patronase yang masih kental dalam diri para aparat pemerintah dalam hubungan mereka dengan rakyat. Secara konseptual pengembangan wilayah merupakan perpaduan dari peningkatan pembangunan di suatu wilayah dan perbaikan kehidupan perekonomian rakyat dengan usaha-usaha pembangunan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Kats dalam Moeljarto (1995), pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Sejalan dengan itu tingkat partisipasi masyarakat desa juga merupakan proses yang terencana dari situasi masyarakat desa yang satu ke situasi masyarakat desa yang lain yang dinilai lebih tinggi atau lebih baik. dengan kata lain pembangunan masyarakat kampung adalah perubahan masyarakat kampung ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditempuh melalui

penerapan prinsip partisipatif. Konsep-konsep tersebut tidak akan berhasil baik apabila hanya dalam tataran konsep, oleh karena itu diperlukan kebijakan lebih penting yaitu implementasi keseluruhan kebijakan tingkat partisipasi masyarakat kampung. Kebijakan harus merupakan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten untuk memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pembangunan. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat kampung.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Upaya pembangunan, diharapkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menggerakkan dan mendukung program pembangunan, karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan Kampung sangatlah penting perannya, seperti kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

11. Pembangunan Kampung

Pembangunan menurut Siagian (2008) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar menuju modernitas. Sementara itu pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005) pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan menurut Tikson (2005) pembangunan merupakan sebagai transformasi

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Dari pengertian pembangunan di atas maka pembangunan kampung atau desa adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana baik dalam ekonomi, sosial dan budaya pada sebuah desa. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan kampung lebih mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara khusus di Provinsi Papua, Bamabas (2007) mengatakan mengapa pembangunan kampung menjadi obsesi nya dalam kepemimpinan sebagai gubernur Papua?. Menurutnya karena sebagian besar rakyat Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya bertempat tinggal di Kampung. Ketika Pembangunan dimulai dari kota, dengan harapan bahwa satu waktu pembangunan itu akan tiba di kampung, maka fakta empiris nya menunjukkan bahwa pembangunan seperti itu lebih sering tidak pernah mencapai kampung, oleh karenanya program dan anggarannya hilang di tengah jalan. Sebaliknya, dengan memberikan perhatian kepada kampung dengan melakukan setidaknya-tidaknya tiga hal, yaitu: (1) mengalokasikan anggaran yang jumlahnya memadai untuk pembangunan kampung; (2)

memberikan kepercayaan dan pendampingan yang bermutu kepada orang – orang kampung agar mereka dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil pembangunan dari, oleh dan untuk mereka sendiri; dan (3) mewajibkan seluruh tingkatan dan instansi pemerintah untuk memberikan perhatian sepenuh-penuhnya kepada pembangunan rakyat di kampung, maka hasilnya pasti akan berbeda. Wajah kampung-kampung akan berubah dan rakyat dalam jumlah besar dan merata akan sejahtera.

12. Operasional Konsep

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) disposisi implementator.

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).
- c. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementator. Disposisi implementator ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian Segu (2016) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi PerBup Kutai Barat No. 12 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan studi pada Kampung Muara Nyahing serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui teknik *Purposive Sampling* dengan *Key Informan* yaitu Kepala Kampung Muara Nyahing, Sekretaris Kampung, Ketua Badan Pengawas Kampung (BPK), Ketua Tim Pengelola ADK dan masyarakat kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ADK untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional telah terlaksana sesuai dengan pedoman atau aturan yang ditetapkan. Kemudian penggunaan ADK untuk kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat belum terlaksana dengan maksimal karena lebih direalisasikan untuk pembangunan fisiknya saja, hal ini dikarenakan dana ADK yang diberikan sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada kampung. Kemudian faktor pendukungnya yaitu Undang-undang dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana, teknologi, sumber daya dan ketersediaan bahan baku pembangunan infrastruktur.

2. Penelitian Dwiansyah (2016) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui teknik *Purposive Sampling* dengan *Key Informan* yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua Badan Pengawas Kampung (BPK), dan masyarakat desa. Hasil

penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan alokasi Dana Kampung di Kampung Banjar Semina tahun 2015 belum optimal, karena belum dilaksanakan sosialisasi tentang alokasi Dana Kampung kepada masyarakat. Sebagian dari alokasi Dana Kampung untuk belanja publik digunakan untuk belanja operasional pemerintah kampung. Perencanaan penggunaan tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan penggunaannya hanya digunakan untuk pembangunan yang bersifat fisik. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung meliputi standar dan tujuan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan kurangnya transparansi dan kompetensi pelaksana.

3. Penelitian Thomas (2013) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang, Kabupaten Tanah Tidung. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Desa Sebawang, Sekretaris, Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan seorang warga. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi 30% dari dana desa bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk 70% sisanya berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan dana desa menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang.

4. Penelitian John (2015) yang bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dalam Anggaran Dana Desa melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitiannya adalah Sekretaris Camat, Kepala Desa beserta jajarannya, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa alokasi Dana Desa belum berjalan optimal. Lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap yang tidak jujur, dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemda adalah faktor yang menghambat implementasi tersebut sehingga tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
5. Penelitian Putra, Pratiwi, dan Suwondo (2013) yang bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Subjek penelitian ini adalah pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

6. Penelitian Ompi (2013) yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung (dana kampung) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pangu yaitu faktor disposisi, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi dan faktor sumber daya. Kemudian, kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai pengganti Kebijakan Dana Saran Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pangu. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Pangu secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.
7. Penelitian Prabawa (2015) yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan, penyaluran dana, pembinaan dan pengawasan di Desa Loa Lepu, Kec. Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Subyek penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan diantaranya kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur pemerintah Desa Loa Lepu. Akan tetapi tidak semua program berjalan dengan tidak baik seperti program pembangunan desa yang telah dirasakan oleh

masyarakat. Semua program pembangunan pemerintah Desa Loa Lepu yang sudah dilaksanakan maupun yang belum selesai pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari pemerintah Desa Loa Lepu untuk menuju perubahan ke arah lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal.

8. Penelitian Kharisma, Anwar, dan Supranoto (2012) yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2008-2012. Metode yang digunakan adalah deskriptif longitudinal dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dengan teknik *sampling purposive* dan *snowball sampling*. Proses analisis data dengan kajian isi dan Model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan pemanfaatan 70% dari dana kampung dalam lima tahun anggaran terakhir difokuskan pada pembangunan fisik, yaitu pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Sedangkan lima bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang lebih menyentuh langsung untuk kesejahteraan masyarakat terabaikan meliputi bidang pembangunan produksi, pemasaran, teknologi tepat guna, kesehatan dan pendidikan dengan alasan minimnya dana desa yang diterima.
9. Penelitian Suparman, Kusnadi, dan Haryono (2014) yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses implementasi program Alokasi Dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program dana desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Subyek penelitiannya adalah Kepala (BPMPDPKB) Kabupaten Kayong Utara, Camat Sukadana, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pemuka masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program Dana Desa di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Hal ini disebabkan oleh adanya prioritas pada pembangunan fisik saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi berjalan dengan optimal.

10. Penelitian Utama (2015) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan desa desa dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, manfaat dana desa dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekdes, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Camat Praya Barat, Kepala Dusun, Pengurus dan Anggota BPD, LKMD, dan tokoh agama, serta karang taruna. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan kegiatan yang di danai dana desa di Desa Kateng belum optimal, pelaksanaannya belum efektif,

dan pertanggung jawabannya belum substantif (hanya administratif). Kegiatan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat juga memberikan dampak positif baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, sumber daya pelaksana menjadi faktor yang memberikan pengaruh kuat dalam mengimplementasikan kebijakan Desa Desa.

Dari sepuluh penelitian terdahulu maka secara ringkas dapat dilihat pada pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Segu (2016)	Model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman	ADK dialokasikan kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional telah terlaksana sesuai dengan pedoman atau aturan yang ditetapkan. ADK kebanyakan untuk pembangunan fisiknya saja. Faktor pendukung dari ADK yaitu Undang-undang dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana, teknologi, sumber daya dan ketersediaan bahan baku pembangunan infrastruktur
Dwiansyah (2016)	Analisis eksploratif	Implementasi kebijakan alokasi Dana Kampung di Kampung Banjar Seminai tahun 2015 belum optimal, karena belum dilaksanakan sosialisasi tentang alokasi Dana Kampung kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung meliputi standar dan tujuan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan kurangnya transparansi dan kompetensi pelaksana.
Thomas (2013)	Analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi 30% dari dana desa bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk 70% sisanya berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada

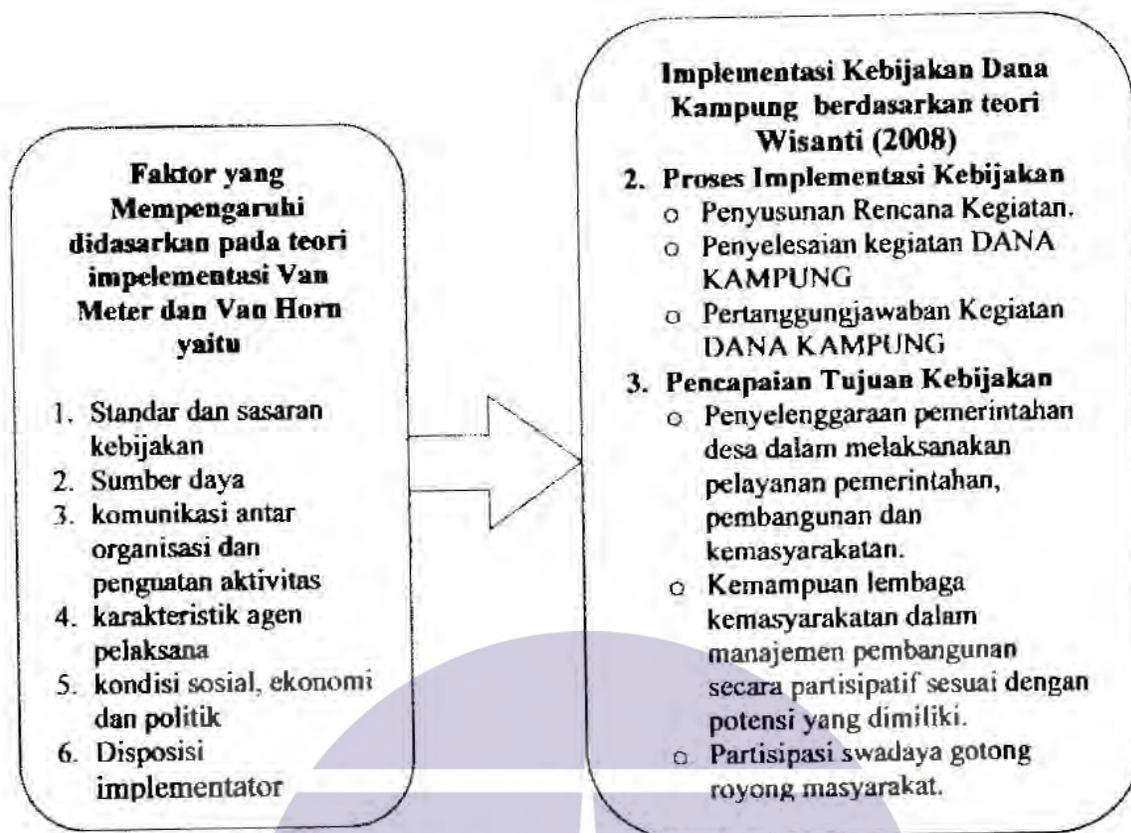
		pembangunan fisik. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan dana desa menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa
John (2015)	Deskriptif kuantitatif	Alokasi Dana Kampung belum berjalan optimal. Lemahnya komunikasi, sumber daya, sikap yang tidak jujur, dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemda adalah faktor yang menghambat implementasi tersebut sehingga tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
Putra, Pratiwi, dan Suwondo (2013)	Metode analisis Milles dan Huberman	Dana desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.
Ompi (2013)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Faktor yang mempengaruhi dana desa adalah faktor disposisi, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi dan faktor sumber daya
Prabawa (2015)	Metode penelitian yang digunakan adalah model interaktif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan.
Kharisma, Anwar, dan Supranoto (2012)	Analisis data dengan kajian isi dan Model Miles dan Huberman	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan pemanfaatan 70% dari dana desa dalam lima tahun anggaran terakhir difokuskan pada pembangunan fisik
Suparman, Kusnadi, dan Haryono (2014)	Analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program dana desa di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan

		<p>sosial ekonomi masyarakat Desa. Hal ini disebabkan oleh adanya prioritas pada pembangunan fisik saja. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi.</p>
Utama (2015)	Analisis deskriptif	<p>Perencanaan kegiatan yang didanai dana desa di Desa Kateng belum optimal, pelaksanaannya belum efektif, dan pertanggungjawabannya belum substantif (hanya administratif).</p>

Dari matriks penelitian terdahulu di atas maka perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah model implementasi menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn sedangkan teori implementasi yang digunakan sebelumnya adalah teori implementasi Edwar III. Dari segi lokasi penelitian ini jelas merupakan penelitian yang masih baru karena dilakukan di kampung Asai distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen.

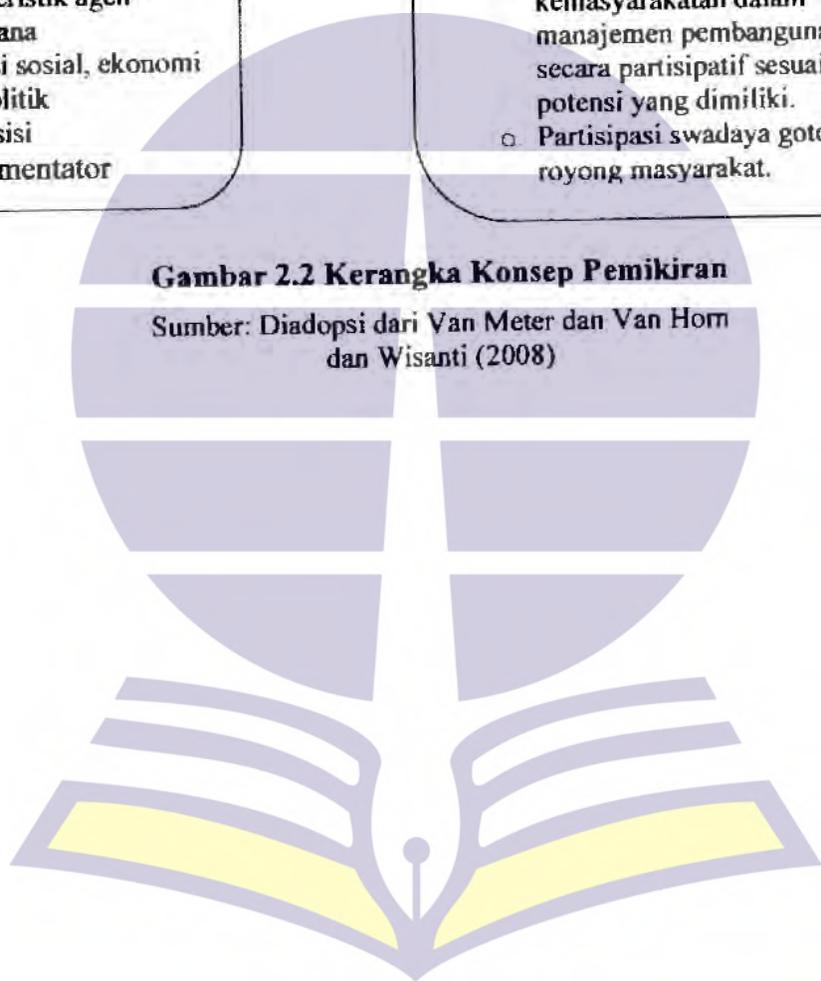
C. Kerangka Konsep Pemikiran

Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian didasarkan pada pendapat Wisanti (2008) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat ditinjau dari dua indikator, yaitu proses implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99). Berikut adalah bagan yang menggambarkan kerangka konsep pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Pemikiran

Sumber: Diadopsi dari Van Meter dan Van Horn dan Wisanti (2008)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan atau Desain Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan teknik yang akan digunakan seorang peneliti dalam menganalisis data dalam sebuah penelitian. Secara garis besar pendekatan penelitian dapat dibedakan dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan, karakteristik, dan prosedur yang berbeda (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini penulis anggap tepat, karena hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dianalisis dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi.

Adapun fokus dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung pada kampung Asai distrik Windesi merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Proses implementasi kebijakan
2. Pencapaian tujuan kebijakan.
3. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung

Berdasarkan ketiga komponen yang menjadi fokus dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan analisis apakah implementasi kebijakan dana kampung mampu mendorong pembangunan pada kampung Asai distrik Windesi. Lebih lanjut, setelah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana kampung di wilayah terkait, maka juga akan dianalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian ini yaitu di kampung Asai distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan subjek penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling* (pengambilan informan dengan kriteria tertentu) yang berfungsi sebagai *key informan*, yaitu kepala Desa, bendahara, dan Ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung), sekretaris distrik Windesi, Asisten Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam melakukan penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebelum ke Lapangan

a. Menyiapkan surat penelitian

Surat penelitian merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penyusun menyiapkan surat izin penelitian dengan pihak kampus. Surat tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian.

b. Menyiapkan panduan wawancara, panduan observasi dan dokumentasi.

Panduan wawancara, panduan observasi dan dokumentasi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam memperoleh data penelitian. Sehingga penyusun harus mempersiapkan dengan baik.

2. Di lapangan

Setelah surat izin penelitian diperoleh maka tahap selanjutnya adalah penyusun menuju lokasi penelitian. Ketika di lapangan nantinya penyusun akan bertemu langsung dengan para informan penelitian. Pada pertemuan ini nantinya penyusun akan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan penelitian. Setelah melakukan wawancara, penyusun juga akan melakukan observasi.

3. Setelah melakukan penelitian

Setelah data telah terkumpul, penyusun melakukan pemilahan data, karena data yang penyusun peroleh belum tentu semuanya terkait dengan

masalah pokok dalam penelitian sehingga perlu penyeleksian data. Setelah data berhasil diseleksi kemudian penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul untuk kemudian diambil kesimpulan.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Umar (2003), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang impementasi kebijakan dana kampung dalam mendorong pembangunan kampung yang diperoleh dari subjek penelitian.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2009), data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti, misalnya penelitian melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa landasan teori, kajian pustaka, maupun data pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian kualitatif menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data yang utama. Menurut Moleong (2007), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua

pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Definisi lain dari wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2012).

Wawancara dilakukan sesuai *interview guide* yang telah disusun sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan spontan yang masih memiliki hubungan dengan penelitian ini. Sehingga isi dari hasil wawancara tersebut bisa menjadi acuan dari penyusunan hasil penelitian dan pembahasan penelitian

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis (Sukardi, 2011). Pelaksanaan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang relevan dengan kepentingan penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati apa saja yang terjadi di lapangan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi berperan aktif,

maksudnya, peneliti memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang bisa diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data (Sutopo, 2006).

Penggunaan observasi dalam penelitian ini berguna untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara (Poerwandari, 2011). Untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan Observasi, dengan survey di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

G. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh di analisis dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut (Sugiyono, 2012).

Menurut Sugiyono (2012), langkah-langkah dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran

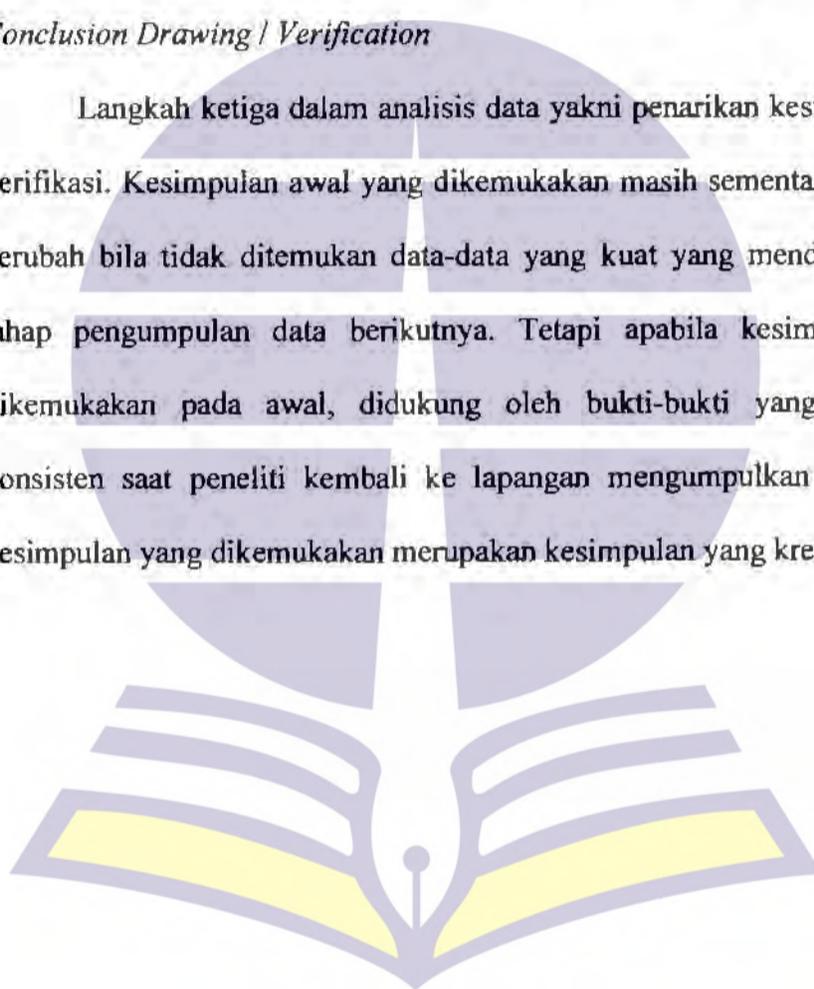
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Display data dilakukan selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan jejaring kerja.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Adapun gambaran mengenai wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, wilayah Distrik Windesi dan Kampung asai adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

i. Aspek Geografi

Kabupaten Kepulauan Yapen berada di Teluk Cendrawasih pada posisi $134^{\circ}46''$ - $137^{\circ}21,964''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}27'47,714''$ - $1^{\circ}58'36,376''$ Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor di Selat Sorenawai;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Waropen di Selat Saireri;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat di Selat Gelvink Bay;
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Jayapura di Sungai Mamberamo.

Kabupaten Kepulauan Yapen secara administrasi terdiri dari 16

distrik, 5 kelurahan, dan 160 kampung yang rinciannya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Banyaknya Kelurahan dan Kampung serta Luas Distrik
di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015

No.	Distrik	Kampung	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1	Angkaisera	10	0	101,09	1,40
2	Kepulauan Ambai	10	0	301,37	4,22
3	Kosiwo	15	0	606,66	8,49
4	Poom	8	0	730,39	10,22
5	Pulau Kurudu	8	0	134,00	7,11
6	Pulau Yerui	5	0	574,03	10,21
7	Raimbawi	7	0	779,49	5,28
8	Teluk Ampimoi	11	0	451,63	6,32
9	Windesi	9	0	479,69	6,71
10	Wonawa	10	0	960,68	9,53
11	Yapen Barat	16	1	793,36	11,10
12	Yapen Selatan	10	3	80,30	05,60
13	Yapen Timur	11	0	393,17	5,50
14	Yapen Utara	7	0	775,58	10,85
15	Anotaurei	7	1	60,12	05,36
16	Yawakukat	8	0	76,30	1,08
Kepulauan Yapen		160	5	7.146,97	100,00
	Hutan Negara			785,26	25,08
	Daratan			2.432,49	64,61
	Lautan			4.714,48	35,39

Sumber : BPS, Kepulauan Yapen Dalam Angka Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.1 Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 16 distrik dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen seluas 7.146,97 km² dimana luas daratan adalah 2.432,49 km² (34,04%) sementara lautan seluas 4.714,48 km² (65,96%).

Secara topografi, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berbukit dan bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan kondisi datar dan landai terutama pada bagian timur dan bagian Barat Pulau Yapen. Tingkat kemiringan lahan sangat bervariasi mulai dari yang datar, bergelombang hingga pada berbukit. Tingkat kemiringan lahan antara 0-4% yang disebut sebagai daerah pantai, sedangkan kemiringan

lahan antara 40-60% adalah kemiringan lahan yang disebut sebagai daerah bergelombang hingga berbukit, lahan ini lebih dominan sekitar pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0-10 m diatas permukaan laut, sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian 200-1.500 m di atas permukaan laut.

j. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebanyak 82.951 jiwa dengan rincian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015

No	Distrik	Luas		Penduduk		Kepadatan (orang/km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Yapen Timur	172,0	5,5	4.618	5,6	27
2	Pantura Yapen	173,0	5,5	2.304	2,8	13
3	Teluk Ampimoi	161,0	5,1	3.416	4,1	21
4	Raimbawi	70,0	2,2	1.120	1,4	16
5	Pulau Kurudu	134,0	4,3	1.335	1,6	10
6	Angkaisera	52,0	1,7	8.046	9,7	155
7	Kep. Ambai	18,2	0,6	3.656	4,4	201
8	Yapen Selatan	60,5	1,9	38.032	45,8	629
9	Kosiwo	44,7	1,4	3.781	4,6	85
10	Yapen Barat	115,8	3,7	7.831	9,4	68
11	Wonawa	63,5	2,0	2.812	3,4	44
12	Pulau Yerui	35,9	1,1	341	0,4	9
13	Poom	69,9	2,2	3.128	3,8	45
14	Windesi	67,3	2,1	2.531	3,1	38
	Hutan Negara	785,3	25,1			
	Kep. Yapen	3.131,0	100,0	82.951	100,0	26

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka 2015

Tabel 4.2. memperlihatkan penyebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen masih terpusat di Distrik Yapen Selatan dimana ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen berada. Jumlah penduduk di Distrik Yapen Selatan paling tinggi sebanyak 38.032 jiwa atau 45.8% dengan

kepadatan sebanyak 629 orang per km². Distrik yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Pulau Yerui dengan 341 penduduk atau 0.4% dan tingkat kepadatan 9 orang per km².

2. Gambaran Umum Distrik Windesi

a. Aspek Geografi

Distrik Windesi adalah salah satu Distrik yang terletak disebelah utara Pulau Yapen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Biak Numfor. Secara astronomis Distrik Windesi terletak diantara 1°37'58.761''-5°41,441'' Lintang Selatan dan 135°50'11.322''-136°12'47.762'' Bujur Barat. Batas wilayah Distrik Windesi adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara Distrik Windesi Berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kosiwo;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Pantura Yapen dan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Poom.

Letak Distrik Windesi berada di pesisir pantai, dengan kondisi ini maka untuk menjangkau satu kampung dengan kampung yang lain menggunakan perahu motor tempel. Distrik Windesi memiliki Luas daratan 222,40 Km², dengan ibukota distrik terletak pada kampung Windesi. Wilayah pemerintahan Distrik Windesi terdiri dari 9 kampung yang tersebar di daerah pesisir dan lembah. Adapun nama-nama kampung dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel. 4.3.
Nama Kampung dan Status Pemerintahan
Distrik Windesi Tahun 2015

No	Nama Kampung	Status Pemerintahan
1	2	3
1.	Waisani	Kampung
2.	Munggui	Kampung
3.	Asai	Kampung
4.	Windesi	Kampung
5.	Saruman	Kampung
6.	Kaonda	Kampung
7.	Karawi	Kampung
8.	Aryobu	Kampung
9.	Rosbori	Kampung

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Yapen 2016

b. Aspek Demografi

Setelah mengetahui letak wilayah Distrik Windesi, maka akan lebih memperjelas dan memahami situasi demografis masyarakat distrik Windesi. Berdasarkan data Statistik Tahun 2015 jumlah Penduduk Distrik Windesi adalah berjumlah 2.809 jiwa, terdiri atas 1.427 laki-laki dan 1.382 perempuan. Namun perbedaan penduduk laki-laki dan perempuan tidak begitu besar yang secara persentase penduduk perempuan dengan persentase sebesar 49,20 % dan laki-laki sebesar 50,80 %. Pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya hanyalah 1,1% atau sebanyak 60 jiwa.

Luas wilayah yang mencapai 222.40 Km², maka secara rata-rata kepadatan penduduk Distrik Windesi mencapai 12,42 jiwa per Km². Secara rata-rata satu Km² dihuni oleh 12 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat

pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
pada masing-masing kampung tahun 2015

No.	Kampung	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Waisani	263	220	483
2.	Munggui	175	166	341
3.	Asai	144	160	304
4.	Windesi	140	119	259
5.	Saruman	148	147	295
6.	Kaonda	118	120	238
7.	Karawi	236	238	474
8.	Aryobu	66	69	135
9.	Rosbori	137	143	280
	Jumlah	1427	1382	2809

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Yapen 2016

3. Gambaran Umum Kampung Asai

a. Letak Geografi

Secara administratif Kampung Asai termasuk dalam wilayah Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas wilayah 1.040,57 Ha atau 4,69 % dari luas wilayah Distrik Windesi dan berada pada titik koordinat $X= 597214,47$ dan $Y= 9817568,06$. Karakteristik wilayahnya berupa pesisir pantai dan daratan. Kampung Asai memiliki batas administratif sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Yapen
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Windesi
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Papuma
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Munggui.

Potensi yang dimiliki Kampung Asai digolongkan dalam beberapa aspek, yaitu :

1) Lahan

Jenis tanah menurut sub grup pada Kampung Asai adalah dominan *typic haplustepts* dan bahan ikutan *typic dystrustepts*. Unsur hara Natrium (Na) pada tanahnya tergolong tinggi, sedang unsur yang lain rendah sehingga kesuburan tanahnya tergolong rendah.

Berdasarkan analisis tingkat kesesuaian lahan terhadap jenis komoditas tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan. Selain itu potensi lahan yang dimiliki adalah tanaman kehutanan yang bernilai konservasi dan ekonomi.

2) Perairan

Potensi perairan yang dimiliki Kampung Asai adalah (1) kualitas air sangat baik dan (2) Masyarakat nelayan. Potensi perairan yang Kampung Asai dapat dikembangkan komoditas Perikanan Tangkap.

3) Kependudukan

Pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk Kampung Asai sebanyak 397 jiwa. Mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan nelayan. Hingga tahun ke 25 (2033) penduduk Kampung Asai

diperkirakan laju pertumbuhan penduduk: 5,80%; sehingga Tahun ke 25 diperkirakan telah berjumlah 1.555 jiwa; Pengurangan penduduk akibat kematian sebesar: 0,78% per tahun; sehingga tahun ke 25 diperkirakan terjadi pengurangan penduduk : 321 jiwa pada kondisi tidak ada serangan wabah penyakit yang berbahaya dan musibah berupa bencana alam lainnya.

4) Fasilitas Sosial

Terdapat 1 bangunan SD Negeri. Fasilitas pendidikan tingkat SMP belum ada. Jumlah siswa saat ini sebanyak 70 orang dengan 6 orang guru. Terdapat 1 bangunan untuk pelayanan kesehatan tetapi tidak berjalan sesuai fungsinya. Tenaga medis yang ada terdiri dari 1 orang bidan.

5) Infrastruktur

Infrastruktur Kampung Asai meliputi jalan, air bersih, listrik, persampahan, dan drainase.

- a) Infrastruktur jalan di Kampung Asai telah ada, namun akses jalan ke ibukota kabupaten dan wilayah sekitarnya belum ada, hanya dapat ditempuh lewat jalur laut.
- b) Sarana air bersih telah tersedia, namun masih dalam bentuk bak penampungan sebanyak 2 buah untuk melayani seluruh KK.
- c) Jaringan listrik telah tersedia namun masih skala rumah tangga dengan menggunakan mesin generator listrik. Sebagian belum menikmati listrik dengan baik.

d) Fasilitas persampahan belum tersedia dengan baik masih memanfaatkan lahan sekitarnya untuk membuang sampah.

e) Drainase pemukiman dan jalan belum tersedia dengan baik.

6) Pariwisata

Kampung Asai berada pada bagian utara sebelah timur Pulau Yapen memiliki garis pantai relatif rata yang berhadapan langsung dengan laut Pasifik sehingga pada musim-musim tertentu gelombang sangat tinggi dan dapat digunakan untuk olahraga selancar air dan rekreasi keindahan alam.

4. Rencana Program Pengembangan Kampung

Rencana program pengembangan Kampung Asai hingga 25 tahun ke depan (2033) terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, diuraikan sebagai berikut :

a. Pendidikan

Rencana pada aspek pendidikan merupakan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan terlaksananya program PELDIDIKPADU, dengan dua program utama yaitu :

- 1) Wajib sekolah 12 tahun
- 2) Peningkatan mutu tenaga pendidik (guru) dan fasilitas sekolah

b. Kesehatan

Rencana pengembangan pada aspek kesehatan dengan program :

- 1) Meningkatkan peran Pustu dan polindes sebagai pelayanan kesehatan masyarakat melalui :

2) Penambahan tenaga medis dengan penambahan perawat sebanyak 5 orang dan bidan sebanyak 5 orang pula yang akan bertugas memberi pelayanan pada masyarakat.

3) *Health security* (keamanan kesehatan) berbasis kampung

c. Perekonomian

Rencana pengembangan di sektor perekonomian sesuai potensi lahan kampung yang dapat dikembangkan meliputi program :

- 1) Pengembangan areal budidaya
- 2) Pengembangan agrobisnis dan agroindustri melalui pembuatan demplot;
- 3) Pengadaan input produksi untuk luas tanam 1.500 Ha; pemberian unsur hara yang dibutuhkan tanaman
- 4) Perbaikan dan manajemen produksi
- 5) Perbaikan panen dan pasca panen;
- 6) Distribusi dan pemasaran;
- 7) Bantuan pemodal;
- 8) Pengembangan sumber daya manusia
- 9) Pembentukan/pemantapan kelembagaan lokal

d. Infrastruktur

Rencana program pengembangan infrastruktur di Kampung Asai yaitu pengembangan prasarana penunjang; meliputi kegiatan :

- 1) Survey jalan penghubung dengan Windesi dan Munggu.
- 2) Inventarisasi kebutuhan berdasarkan fungsi jalan
- 3) Peningkatan jalan aspal sepanjang 264,54 m.

- 4) Survei dan pembuatan drainase.
- 5) Pengadaan jaringan telekomunikasi berupa BTS melalui kerja sama dengan operator nasional.
- 6) Pengadaan listrik dengan tenaga Hydro micro pada seluruh rumah
- 7) Peningkatan sarana air bersih menjangkau pemukiman masyarakat; melalui sistem perpipaan dari sumber air.
- 8) Perbaikan rumah masyarakat untuk masyarakat kurang mampu.
- 9) Peningkatan sanitasi lingkungan; dapat berupa pemberian informasi maupun kegiatan pengelolaan persampahan, pengadaan MCK dan sebagainya.

e. Pariwisata

Rencana program pengembangan Pariwisata di Kampung Asai yaitu pengembangan prasarana penunjang; meliputi kegiatan :

- 1) Survey dan pembuatan perencanaan pariwisata Kampung Asai.
- 2) Inventarisasi kebutuhan berdasarkan fungsi wisata
- 3) Pelaksanaan pekerjaan.

5. Struktur Pemerintah Kampung Asai

Struktur pemerintah Kampung Asai tahun 2016 adalah sebagai berikut.



Penyusunan RPJMK, RKPK & RABK Kampung Asai Distrik Windesi

Tahun Anggaran 2016, diangkatlah empat orang tim penyusun, yaitu:

- h. Kundrad Raubia (Kepala Kampung) sebagai Penanggung Jawab;
- i. Sem Puari (Ketua Bamuskam) sebagai Koordinator;
- j. Terianus Ayomi (Sekretaris Kampung) sebagai Sekretaris;
- k. Demianus A. Maniamboy (Bendahara) sebagai Anggota

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Tabel 4.5. di bawah ini menunjukkan tentang anggaran pendapatan dan belanja Kampung Asai tahun anggaran 2015 dan 2016.

Tabel 4.5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun 2015 Dan 2016

No	Deskripsi	2015	2016
1	Pendapatan Desa	254.071.720,-	763.775.658,-
2	Belanja Desa	254.071.720,-	763.775.658,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	105.921.720,-	344.260.658,-
	b. Bidang Pembangunan	-	125.015.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	148.150.000,-	30.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	264.500.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	-	-
3	Pembiayaan Kampung		
	a. Penerimaan Pembiayaan	51.000.000,-	51.000.000,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	51.000.000,-	51.000.000,-

Sumber: Peraturan Kampung Asai Tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran pendapatan Kampung Asai mengalami peningkatan pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya, meskipun tidak begitu signifikan peningkatannya. Nominal pendapatan desa diperoleh dari Dana Kampung (DK), bantuan keuangan dari pemerintah daerah, dan silfa Dana Kampung (DK) tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, Dana Kampung sebesar Rp. 600.195.658,-, bantuan

keuangan dari pemerintah daerah sebesar Rp. 163.580.000,-, dan silfa 2015 sebesar 50.662.272,-. Berdasarkan komponen tersebut diperoleh nilai total pendapatan Kampung Asai pada tahun 2016 sebesar Rp. 763.775.658,-.

Kemudian berdasarkan komponen belanja desa, penggunaan terbesar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pembangunan kampung Asai belum begitu optimal karena serapan penggunaan dana lebih banyak digunakan untuk kegiatan administratif pemerintah kampung, baik digunakan untuk penggajian maupun kegiatan administratif lainnya.

Lebih lanjut, pada tahun 2016, Kampung Asai tidak hanya terfokus pada bidang pembangunan (fisik) dan pembinaan kemasyarakatan (sosial budaya) saja, namun sudah mengarah pada kegiatan pemberdayaan masyarakat (pembangunan ekonomi) yang mampu menghasilkan nilai tambah (*value Dana Kampunged*) dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari alokasi belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pembagian alokasi dana tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam Forum Musrenbang Kampung. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebesar 30% dari Total Belanja Kampung.
- b. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Kampung, yang terbagi menjadi :
 - 1) Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 60% dari Total Belanja Pembangunan

2) Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 7% dari Total Belanja Pembangunan

3) Bidang Sosial dan Budaya sebesar 3% dari Total Belanja Pembangunan.

Komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Kampung terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Asai pada tahun 2015-2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 35 (tiga puluh lima) masalah pengembangan fisik, 11 (sebelas) masalah ekonomi dan 7 (tujuh) masalah sosial budaya. Sedangkan penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Berikut adalah daftar prioritas masalah yang akan ditangani pada tahun anggaran 2016.

Tabel 4.6.
Daftar Prioritas Masalah Kampung Asai Tahun 2016

NO	BIDANG	MASALAH
1.	Pendidikan	1. Lembaga Pendidikan anak Usia Dini belum tersedia baik fasilitas bangunan dan sarana dan prasarana bermain
2.	Kesehatan	1. Masih kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya kesehatan 2. Masih kurangnya sarana air bersih di tiap lingkungan 3. masih minimnya upah untuk para kader kesehatan di Kampung 4. Masih kurang sadarnya orang tua membawa anaknya ke Posyandu 5. Masih kurang sadarnya masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi/KB 6. Masih belum Optimalnya Kegiatan BKB,BKR,BKL, dan UPPKS

3.	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih banyaknya anak yatim dan orang jompo 2. Guru Agama 3. Masih adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni 4. Sanitasi/MCK Belum tersedia secara baik layak
4.	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Perangkat masih lemah 2. BPD, LPM, dan PKK belum berfungsi secara maksimal 3. Balai Kampung belum terbangun 4. Ruangan kantor Kampung belum tersedia
5.	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan dan Bahu jalan masih labil 2. jalan Tanah sudah rusak 3. Belum adanya jalan Poros Kampung yang memadai 4. Belum meratanya pemasangan jaringan listrik
6.	Koperasi Dan Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peralatan bagi para pengrajin yang ada di Asai 2. Minimnya pengetahuan tentang pemasaran dan manajemen usaha 3. Kurangnya Modal Usaha bagi para Pengrajin dan Petani serta nelayan
7.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya bibit unggul yang tersedia baik untuk Pertanian atau Peternakan 2. Masih kurangnya peralatan pertanian 3. Masih kurangnya pasokan air terutama untuk tanaman palawija 4. Minimnya Pengetahuan Petani
8.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana pendukung 2. kurangnya kesadaran masyarakat untuk menata lingkungan

Sumber: RKPK Kampung Asai Tahun Anggaran 2016

B. Hasil Penelitian

Pada sub bab hasil penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan 7 orang yang telah penulis tetapkan sebagai responden. Ada dua tujuan utama dalam penelitian ini yaitu 1) menganalisis implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi dan 2) menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi.

Setelah dilakukan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai dinilai telah terealisasi dengan baik dan efektif meskipun fokus pengelola dana

kampung masih terpaku pada pembangunan fisik. Hal ini dapat dilihat dari ajuan rencana pembangunan yang diusulkan dan bukti-bukti fisik dari realisasi dari rencana-rencana tersebut.

Implementasi dana kampung di Kampung Asai, utamanya pada tahun 2015 dan 2016 baru mengarah pada pelaksanaan pembangunan Desa di tiga bidang, yaitu:

1. Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik
2. Sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
3. Sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan

Sedangkan dua bidang lainnya, yaitu pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup belum dapat direalisasikan. Mengingat kampung Asai termasuk kampung berkembang, maka pelaksanaan ketiga bidang pembangunan tersebut di atas telah sangat sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015.

1. Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Kampung Asai Distrik Windesi

Implementasi kebijakan anggaran dana kampung di kampung Asai Distrik Windesi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu (a) proses implementasi kebijakan dana kampung, dan (b) pencapaian tujuan kebijakan dana kampung. Secara umum pelaksanaan Dana Kampung telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan Dana Kampung di Kampung Asai masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai

fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian. Berikut ini adalah penjabaran hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan anggaran dana Kampung Asai Distrik Windesi.

a. Proses Implementasi Kebijakan Dana Kampung Asai

1) Penyusunan Rencana Kegiatan.

Proses awal dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan ini mencakup banyak aspek, seperti siapa yang merencanakan, bagaimana direncanakan, dan apa yang rencanakan.

Pertama, pihak yang merencanakan kegiatan dan program dalam Dana Kampung adalah para pihak pengelola Dana Kampung di wilayah terkait, dalam konteks ini adalah Kampung Asai Distrik Windesi. Kepala Kampung Asai menjelaskan saat diwawancarai tentang siapakah pengelola Dana Kampung di Kampung Asai:

“Pengelola Dana Kampung adalah Kepala kampung asai, Bamuskam, RK, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan”.

Berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kampung Asai. Artinya, rencana kegiatan yang akan dibuat tentunya telah merepresentasikan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian terkait dengan tanggung jawab masing-masing pengelola, Bendahara Kampung Asai mengungkapkan bahwa

“Pengelola Dana Kampung di kampung asai adalah Kepala Kampung Selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris Kampung Selaku pelaksana program kegiatan di kampung

Asai, namun dalam struktur pengawasan pembangunan semua pemangku kepentingan di kampung asai, baik Bamuskam RK, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dilibatkan secara langsung pada saat penggalan gagasan hingga sampai menentukan kegiatan yang akan di programkan dalam 1 (satu) tahun anggaran”

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa “Pengelola Dana Kampung Pada 160 Kampung dan Khususnya kampung Asai adalah Kepala Kampung Dan perangkat Kampung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB III pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dimana PTPKD terdiri dari sekretaris selaku koordinator, kepala seksi sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara” (Hasil wawancara dengan Bapak Droyfilus Yan Lestuni). Merujuk pada hasil wawancara di atas diketahui bahwa pembagian tugas antar pengelola Dana Kampung sudah sangat jelas sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya akan mengganggu proses implementasi kebijakan.

Kedua, berkaitan dengan proses perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan pengelolaan Dana Kampung telah memiliki payung hukum yang jelas sehingga prosesnya juga harus mengacu pada aturan tersebut. Proses perencanaan kegiatan yang berjalan adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung

(MUSRENBANG) yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pengelola, pelaksana, maupun pengawas. Pada MUSRENBANG semua usulan ditampung dan dibahas sehingga mampu menghasilkan putusan yang sesuai dengan kebutuhan kampung. Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen:

“Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Dana Kampung disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (MUSRENBANG) yang mana dalam MUSRENBANG tersebut hadir seluruh Stakeholder (pemangku kepentingan) yang berada di kampung baik pemerintah kampung, Bamuskam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, tokoh Pemuda dan Warga masyarakat baik RT dan RW. Musrenbang tersebut terjadi usulan-usulan kegiatan dari seluruh peserta musrenbang sesuai dengan prioritas kegiatan dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi. Jadi yang menyampaikan rencana kegiatan adalah peserta rapat tersebut yang kemudian dicatat oleh notulen dalam hal ini Kepala urusan program untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBK”

Informasi di atas diperkuat oleh Bendahara kampung asai yang mengungkapkan bahwa “Kepala Kampung dan tim pada tahap awal menyusun rencana kegiatan Dana Kampung yang diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja kampung di Kampung Asai untuk 1 tahun anggaran yang kemudian dibahas bersama dalam MUSRENBANG di tingkat kampung. Rencana kegiatan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang telah disusun sebelumnya”. Musyawarah tersebut akan memutuskan program kegiatan mana saja yang dapat dibiayai dan hal tersebut adalah syarat utama dalam pencairan dana Dana Kampung. al

ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai.

“Program kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana kampung akan di tandai dan program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daftar program kegiatan pada SKPD terkait”

Ketiga, hasil putusan MUSRENBANG di tingkat kampung untuk tahun 2016 ditentukan 8 program kegiatan, namun yang diprioritaskan hanya 5 program saja yang masih didominasi pada alokasi pembangunan fisik untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat dan mempermudah aktivitas perekonomian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bendahara Kampung Asai.

“Di Kampung Asai telah ditentukan 8 (delapan) program kegiatan namun yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan terdapat 5 (lima) program adalah:

- 1) Pembangunan Rumah Layak Huni yang di targetkan tahun 2021 masyarakat di kampung asai pada umumnya sudah memiliki rumah sendiri yang bersumber dari dana Dana Kampung;*
- 2) Tenaga Guru, Tenaga Medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang mendasar di kampung asai;*
- 3) Perbaikan MCK di Kampung Asai;*
- 4) Talud Pantai Sepanjang 800 Meter di Kampung Asai.*
- 5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) Kampung Asai”*

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas diketahui dalam proses perencanaan program dan kegiatan di Kampung Asai telah berjalan dengan baik. Kemudian juga telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah melibatkan seluruh pemangku kebijakan sehingga setiap putusan yang dihasilkan dari musyawarah mampu mewakili aspirasi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mendasar di Kampung Asai.

2) Penyelesaian kegiatan dana kampung

Setelah kegiatan penyusunan rencana kegiatan telah berhasil dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan penyelesaian rencana kegiatan dana kampung. Pada praktik pelaksanaan, terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan. Artinya ada realisasi kegiatan yang tidak direncanakan pada MUSRENBANG. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kampung Asai, sebagai berikut.

“Penyusunan rencana dana kampung berbeda atau belum sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dikarenakan dalam penyusunan RKP, RAPBK masih menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu diakomodir dalam pembelanjaan kampung”

Kepala Kampung Asai ini juga menambahkan bahwa “pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang tidak diakomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung Asai (RKPK), diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan gedung gereja dan penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu (PUSTU) (hasil wawancara dengan Bapak Kundrat Raubia). Adanya penelaahan terhadap program yang direalisasikan di luar rencana kegiatan, penulis berpendapat bahwa kegiatan tersebut tetap perlu dilakukan karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum, utamanya dalam kenyamanan masyarakat dalam beribadah di gereja dan pembangunan fasilitas penunjang fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan jawaban yang berbeda

berdasarkan perspektif laporan pertanggungjawaban yang ia terima, yaitu Kampung Asai tidak melakukan penyimpangan kegiatan dan seluruh kegiatan telah berhasil dilakukan sesuai dengan rencana yang disusun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

“Terkadang juga ada beberapa kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan direncanakan, tetapi Kampung Asai dari data pertanggungjawaban yang dimasukkan pada Bagian Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Anggaran Belanja Kampung yang telah ditetapkan”

3) Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Sekretaris Distrik Windesi, sebagaimana pernyataan berikut :

“Kampung asai pada tahun 2016 proses pertanggung jawaban Dana Kampung yang telah digunakan jika dilihat dari laporan pertanggung jawabannya saya pikir sudah sangat baik, karena setelah penggunaan kepala kampung beserta sekretaris kampung dan bendahara langsung menyiapkan laporan pertanggung jawabannya sesuai juknis yang direkomendasikan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, meski masih terjadi keterlambatan waktu pelaporannya namun secara keseluruhan sudah sangat baik dilakukan oleh penanggung jawab Dana Kampung di Kampung Asai” .

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa Setelah realisasi pencairan Dana Desa dan program selesai dilaksanakan, Kepala Kampung Asai sebagai penanggung jawab kegiatan bersama tim langsung menyiapkan laporan pertanggung jawabannya sesuai petunjuk yang direkomendasikan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian jika meninjau dari sisi waktu pelaporan, kampung Asai

mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Kepala kampung Asai menambahkan bahwa “laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan dengan realisasi program kegiatan yang dikerjakan di tingkat kampung, kalau terdapat pekerjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat” (Hasil wawancara dengan Kepala kampung Asai).

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan Dana Kampung Asai

Pencapaian tujuan kebijakan yang secara langsung dapat dicapai dalam implementasi kebijakan adalah (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, (2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam manajemen pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan (3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Uraian dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, realisasi Dana Desa di kampung Asai telah menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Sekretaris Distrik Windesi, mengungkapkan bahwa:

“Berbicara manfaat dari Dana Kampung kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat kampung khususnya di kampung asai saya pikir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena dengan adanya Dana Kampung ini maka proses pembangunan di kampung asai sangat menunjukkan proses peningkatan taraf

hidup mulai dari persediaan perumahan masyarakat sampai pada pembangunan infrastruktur ekonomi dasar di kampung”

Kemudian, Sekretaris Distrik Windesi juga memberikan contoh konkrit dari besarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana ia ungkapkan bahwa “contoh yang paling kongkrit adalah masyarakat dapat membangun rumah yang layak untuk di huni dari Dana Kampung ini tanpa harus mengeluarkan uang pribadi, sehingga uang pribadi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang lain, selain itu terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kampung asai, dengan adanya pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya maka tenaga kerja juga dibutuhkan dalam rangka pembangunan tersebut. Maka sudah barang tentu masyarakat setempat yang dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Sehingga tenaga kerja ini di honor dan mendapatkan uang di kampung serta tidak harus bersusah payah ke kota kabupaten untuk mencari kerja” .

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Kepala Kampung Asai menambahkan bahwa “realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal” (Hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi program yang sesuai rencana dan memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat belum tentu mampu menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. salah

satunya adalah kekurangan dalam memberikan pelayanan karena sistem birokrasi yang tidak dikelola dengan baik.

Selanjutnya dari aspek pembangunan, kampung Asai melakukan pembangunan fisik dan non-fisik sekaligus. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bamuskam Kampung Asai berikut.

“Fisik: Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan mck dan Non fisik: pemberian dana penunjang kegiatan tim penggerak pkk, dana penunjang kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di kampung asai dalam menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada tahun 2016 realisasi Dana Desa secara fisik atau pembangunan sarana dan prasarana diperuntukkan untuk pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan MCK. Kemudian bendahara Kampung Asai menambahkan adanya pembelian motor tempel dalam ungkapannya bahwa “hasil fisik yang sekarang telah dirasakan di kampung asai yaitu pengadaan motor tempel yang menjadi alat penunjang transportasi yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke kota, memuat hasil dagangan dan lain sebagainya” (hasil wawancara dengan Bendahara Kampung Asai). Pengadaan motor tempel dan pembangunan rumah layak huni juga diamini oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) pada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kemudian realisasi Dana Desa tahun 2016 secara non fisik menghasilkan beberapa *output* kegiatan, yaitu pemberian dana penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK, kepemudaan, dan kader posyandu. Perincian kegiatan dari pemberian dana tersebut sebagai dijelaskan oleh Kepala Kampung Asai adalah sebagai berikut:

- a) *Penunjang kegiatan PKK digunakan untuk membuat baju batik seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara – acara resmi PKK di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten*
 - b) *Penunjang kegiatan kepemudaan digunakan untuk pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim bola dan penunjang kegiatan lain selama mengikuti kegiatan bupati cup pada tahun lalu.*
 - c) *Penunjang kegiatan kader posyandu digunakan untuk menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita (hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai).*
- 2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pada sub bahasan ini, terdapat fenomena yang menarik karena terdapat perbedaan pandangan dari para informan. Perbedaan yang muncul ke permukaan adalah tentang eksistensi lembaga pemasyarakatan desa dalam mendukung pembangunan, seperti tercermin pada hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai berikut ini:

“Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan dana kampung di Kampung Asai”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi pihak eksternal dalam pengelolaan Dana Desa, baik itu LPMD, BPD, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai dan

bendahara Kampung Asai. Bahkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa menambahkan bahwa:

“pada saat ini sama sekali belum kelihatan adanya korelasi hubungan kelembagaan yang jelas yang ada di kampung, peranan BAMUSKAM sendiri sama sekali tidak ada hanya sebatas BAMUSKAM terkadang kepala desa sendiri sama sekali tidak melibatkan lembaga-lembaga lain yang ada di kampung dalam hal ini musyawarah kampung untuk merencanakan bersama pembangunan kampung, terkesan bahwa semuanya dilakukan oleh kepala kampung sendiri, misalnya hal terpenting sekali dalam pelaksanaan MUSRENBANG desa apakah sudah dibentuk tim perumus untuk penyusunan dan penetapan dokumen RPJMK, saya sendiri belum melihat hal itu dilaksanakan di kampung, padahal itu sangat penting sekali sehingga keterlibatan masyarakat tidak nampak bahkan lebih parah lagi tidak dilibatkan sama sekali, jika kita melihat hanya dokumen RPJMK dan RKP saja yang ada tetapi prosesnya tidak ada”.

Pendapat di atas mengindikasikan kecurigaan dari pemerintah daerah bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh kampung, baik RPJMK maupun RKP adalah dokumen fiktif yang disusun tanpa mekanisme yang sesuai. Sekretaris Distrik Windesi memiliki pandangan berbeda bahwa lembaga pemasyarakatan desa telah berkontribusi maksimal dalam realisasi Dana Desa, baik dalam proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pendapat tersebut disampaikan pada jawaban wawancara berikut ini.

“Kontribusi BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan Dana Kampung jika dilihat dari bentuk kegiatan seperti musyawarah, kerja lapangan dan pengawasan lembaga-lembaga desa ini sangat memberikan kontribusi, karena dari pandangan kami di kampung asai, proses pelaksanaan Dana Kampung itu sendiri merupakan hasil kerja sama yang baik dari setiap bahkan seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga desa ini, hal ini dikarenakan jumlah penduduk asai yang tidak terlalu banyak sehingga ketika ada kegiatan maka keterlibatan masyarakat maka di dalamnya sudah terwakili komponen lembaga desa tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan, peneliti berkesimpulan bahwa kontribusi lembaga pemasyarakatan desa masih sangatlah minor dan harus ditingkatkan kontribusinya di masa mendatang. Kesimpulan ini didasarkan pada pendapat para informan internal pengelola Dana Desa di Kampung Asai yang secara kompak mengungkapkan bahwa belum ada kontribusi dari pihak eksternal dalam pembangunan di kampung Asai, sedangkan pendapat tentang adanya kontribusi pihak eksternal diperoleh dari sekretaris distrik Windesi yang dimungkinkan hanya melihat realisasi Dana Desa berdasarkan laporan yang diberikan, bukan berdasarkan kondisi di lapangan.

3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Mengamati kontribusi dari para pemangku kepentingan, utamanya masyarakat setempat para informan sepakat bahwa masyarakat Kampung Asai sangat berperan aktif dalam mendukung seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut.

“Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) tahun anggaran”

Ungkapan di atas juga didukung oleh jawaban Kepala Kampung Asai, bendahara, dan sekretaris Distrik Windesi. Di sisi lain, kontribusi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tidaklah datang begitu saja, namun telah melalui proses panjang dan ada strategi khususnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala kampung Asai.

“Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Transparansi pemerintah kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati oleh masyarakat”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa peran aktif masyarakat dalam kegiatan merupakan hasil dari penerapan strategi para pengelola Dana Desa yang mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup bergotong royong dan adanya transparansi pemerintah kampung dalam menyampaikan setiap program.

Frans Jerys selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA.PMD) pada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Kepulauan Yapen menambahkan tentang kontribusi Dana Desa terhadap roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan berikut ini.

- a) *“Dampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan, menurut saya masih jauh dari harapan seperti saya sampaikan diawal bahwa sama sekali belum kelihatan jelas tugas dan fungsi utama dari aparatur pemerintahan kampung, lebih cenderung ke arah birokrasi yang tidak jelas, hubungan antar kelembagaan juga tidak jelas korelasi nya masih kurang.*
- b) *Dampak pada pembangunan, menurut saya sudah baik karena kebijakan Dana Kampung adalah untuk memperkuat kemampuan keuangan desa, di samping itu untuk memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan, untuk mendorong terciptanya demokrasi desa, untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.*
- c) *Dampak pada pelayanan kemasyarakatan, menurut saya masih sangat rendah secara kualitas maupun kuantitas. Dapat diambil satu kasus dimana masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintahan desa*

yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat, di samping itu kualitas SDM aparatur pemerintahan desanya juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja, ada kecenderungan aparat pemerintah desa mempertahankan status quonya (arogansi) sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang berbelit-belit di samping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau golongan tertentu (ikatan keluarga) ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa realisasi Dana Desa tidak berdampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan karena struktur birokrasi yang tidak jelas. Kemudian dari aspek pembangunan, keberadaan Dana Desa meningkatkan jumlah dana yang dikelola kampung sehingga kampung memiliki keleluasaan untuk menciptakan program pemerataan bagi masyarakat kampung. Sedangkan dari sisi pelayanan kemasyarakatan, realisasi Dana Desa tidak berdampak bagi perbaikan pelayanan kemasyarakatan. Artinya pelayanan yang diberikan masih buruk dan mencirikan proses birokrasi yang berbelit-belit.

Hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan Dana Desa di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa tidak memiliki kontribusi dalam pembangunan, dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan Dana Desa belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan dana

kampung dan pencapaian tujuan kebijakan dana kampung dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana kampung telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

Lebih lanjut, menurut Kepala Kampung Asai dalam wawancara, beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola Dana kampung di Kampung Asai dalam merealisasikan program kegiatan adalah:

- 1) Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa kayu, batu, pasir, dan lain sebagainya, pemilik masih menuntut ganti rugi atau menuntut bayar dengan alasan yang tepat.
- 2) Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi pembangunan rumah menuntut ongkos muat yang terlalu tinggi.
- 3) Pembelian material non lokal dan lokal kadang melebihi dari anggaran sehingga berpengaruh laporan pertanggung jawaban.

Selain beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, sekretaris distrik Windesi menambahkan bahwa keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban kegiatan jumlah menjadi kendala. Hal ini berdampak besar bagi proses pencairan dana selanjutnya dan mengganggu pelaksanaan program. Kendala ini disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu karena perjalanan ke Kantor Kabupaten Yapen hanya bisa diakses melalui jalur laut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Kampung

Implementasi kebijakan dana kampung di Kampung Asai Distrik Windesi yang telah dijabarkan di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mungkin dapat mendukung atau menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung adalah sebagai berikut.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan memiliki karakteristik khusus yang melekat, diantaranya adalah jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Pada proses pengajuan dan pelaporan Dana Kampung, Pengelola Dana Kampung di Kampung Asai mengacu pada PERMENDAGRI 113 tahun 2014 bab IV pasal 12 – 19 dan aturan tersebut berisi tentang ketentuan yang jelas dan terperinci. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala kampung Asai dan dikuatkan dengan jawaban kepala BAMUSKAM dan bendahara Kampung Asai.

“ Pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113 tahun 2014 bab IV pasal 12 sampai dengan pasal 19”

Secara lebih detail, staf P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen menjabarkan tentang payung hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Kampung sebagai berikut.

“Jelas harus ada kerana semua sudah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri no.113 tentang laporan administrasi desa, perubahan pertama peraturan

pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari APBN, peraturan pemerintah no. 22 tahun 2015 tentang penganggaran Dana Kampung dalam APBN, perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, peraturan pemerintah no.8 tahun 2016, Permendagri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Permendagri no. 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi pengelolaan keuangan desa, SKB 3 Menteri (mendagri, menkeu, mendes PDDT) tahun 2015 tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Kampung”

Proses pengajuan, seluruh aturan-aturan yang disebutkan di atas digunakan sebagai media kontrol oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah persiapan RPMJK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK (Rencana kerja Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung yang harus diserahkan sebagai syarat pengajuan dana kampung. Sedangkan dalam proses pelaporan, pengelola dana kampung harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban Dana Kampung sesuai dengan APBK dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen berikut ini.

“Ya, dalam pengajuan Dana Kampung setiap kampung harus harus memenuhi prosedur/persyaratan dengan mempersiapkan RPMJK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK (Rencana kerja Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung. persyaratan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Pemerintah Daerah untuk dievaluasi (dikoreksi) apakah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Permendagri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK-07/2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015; Nomor 21 Tahun 2015; sedangkan pelaporan Dana Kampung setiap kampung harus menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Dana

Kampung sesuai dengan APBK dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, serta harus melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Buku Bank Desa” (hasil wawancara dengan Bapak Drofilus Yan Lestuni)

Terlepas dengan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang pengelolaan dana kampung, implementasi kebijakan tidak akan sukses jika aturan tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik. Menurut informasi dari para informan, selama Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung dengan baik, sehingga mempermudah pengelolaan di tingkat kampung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua Badan Musyawarah Kampung Asai dan diperkuat oleh kepala kampung dan bendahara berikut ini.

“Penggunaan anggaran sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, sehingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam penyampaian laporan SPJ” (hasil wawancara dengan Ketua BAMUSKAM)

Sekretaris distrik Windesi menambahkan bahwa selain sosialisasi yang dilakukan, pemerintah kabupaten juga tidak menutup ruang bagi setiap kampung untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan Dana Kampung tersebut. Disamping itu pula di setiap distrik ditempatkan pendamping-pendamping kampung yang juga siap memberikan pendampingan bagi pelaksanaan Dana Kampung.

Berdasarkan penjabaran di atas, adanya standar dan tujuan kebijakan yang jelas yang ditunjukkan dengan aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan adanya sosialisasi kebijakan sehingga

mempermudah penerapan dana kampung di lapangan menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan berdampak positif bagi implementasi kebijakan dana kampung. Artinya adanya standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan dana kampung.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Pertama, terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan yang dihadapi oleh kampung, utamanya yang jauh dari perkotaan adalah rendahnya kualitas SDM yang dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), secara umum kampung-kampung yang berada jauh dari daerah kota masih memiliki kekurangan pada kualitas Sumber Daya Manusianya. Dan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan Dana Kampung. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah”

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola dana kampung, maka masih banyak dibutuhkan banyak pembekalan tentang pengelolaan Dana Kampung sehingga dapat menjadi lebih profesional di masa mendatang. Bahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menugaskan seorang PNS untuk menjadi bendahara kampung sehingga diharapkan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Distrik Windesi

yang juga dikuatkan dengan pernyataan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Sumber daya manusia pengelola Dana Kampung memang masih terbatas, sehingga dari keterbatasan itu menurut kami mereka masih harus dibekali dengan ilmu-ilmu bahkan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Kampung. Namun di sisi lain pemerintah kabupaten kepulauan yapen melalui bupati memberikan masukan khususnya bendahara kampung untuk sementara dikelola oleh pegawai negeri sipil yang berasal dari pemerintah distrik setempat seperti halnya distrik windesi bendahara kampung asai adalah pegawai distrik sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan bahkan pertanggung jawaban keuangan kampung secara baik” (hasil wawancara dengan Sekretaris Distrik Windesi).

Kedua, dari sisi sumber daya non-manusia dapat ditinjau dari aspek permodalan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kampung Asai berikut.

“Selain dana kampung sumber dana lain yang sekarang digunakan oleh pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek” (hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai)

Berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa sumber permodalan selain dana Kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kampung juga memiliki sumber pendanaan yang lain berupa Alokasi Dana Kampung yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipergunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Kampung, tnjangan Badan Musyawarah Kampung dan Insentif Bagi RW/RT dan Linmas serta Operasional Perkantoran, disamping itu ada juga dana prospek yang berasal dari pemerintah Provinsi Papua, dana prospek tersebut dimanfaatkan secara khusus untuk pembangunan ekonomi masyarakat, bukan untuk pembangunan fisik. Dana prospek yang diajukan pada tahun 2015 akan digunakan pada tahun

2016 dan berlaku seterusnya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh ketua BAMUSKAM, bendahara, sekretaris distrik Windesi, dan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kemudian dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, Kampung Asai memiliki balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, generator, dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis, keberadaan sarana dan prasarana sangat menunjang realisasi dana kampung. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kampung Asai.

“Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, generator dll”

Di sisi lain, selain sarana dan prasarana pendukung di atas, ada beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat implementasi kebijakan. Diantaranya adalah fasilitas penerangan (listrik) dan belum adanya sarana transportasi reguler dari kampung ke kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) program P3MD dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“Hal berikut yang juga menjadi penghambat kebijakan dana Kampung setelah masalah SDM adalah masalah fasilitas (sarana-prasarana) pendukung bagi aparat pemerintah kampung yang masih kurang memadai. Ini mengakibatkan para aparat pemerintah kampung lebih banyak menghabiskan waktunya di kota untuk mengerjakan hal-hal yang mengenai administrasi. mulai dari fasilitas penerangan (listrik) yang kurang memadai (jika ada, tidak selalu beroperasi), juga mengenai transportasi yang jarang / bahkan tidak ada yang reguler antara kampung ke kabupaten untuk berproses”

Sedangkan terkait sumbangsih masyarakat kampung hingga saat ini dinilai belum secara keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran

yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan pasir yang tidak terpakai namun masih layak digunakan masih harus dibayar oleh pengelola dana.

c. Hubungan Antar Organisasi

Ada banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Menurut pendapat Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) program P3MD, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam realisasi dana kampung adalah

- 1) *Pemerintah Pusat (Kementerian terkait)*
- 2) *Pemerintah Propinsi*
- 3) *Pemerintah Kabupaten*
- 4) *Pemerintah Kampung (Kepala Desa)*
- 5) *BPD*
- 6) *Kepala Dusun*
- 7) *Perangkat Desa*
- 8) *Unsur LMD*
- 9) *Unsur Kelembagaan Desa*
- 10) *Pendamping Desa (TA, PD, PLD)*
- 11) *Pihak ketiga (kontraktor/swasta)*
- 12) *Suplier (Pihak Toko)*

Seluruh pihak yang disebutkan di atas memiliki peran masing-masing dimana peran tersebut diarahkan untuk mensukseskan realisasi dana kampung. Peran-peran tersebut diantaranya adalah peran pelaksana, pengawasan, dan mengontrol proses pencairan hingga pelaporan. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin banyak komunikasi hierarkis yang terjalin dan hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan semakin erat. Hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) program P3MD dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut :

“Pola Hubungan/kerja sama yang terjalin antara pihak terkait/ yang terlibat dalam implementasi dana kampung secara umum sangat luas, namun jika bisa dipersempit ke beberapa pola sebagai berikut adalah 1. Pola hubungan yang dilakukan berdasarkan peran wilayah/ posisi / kedudukan (jabatan). 2. Pola hubungan yang berbentuk “kemitraan” yang pada hakekat nya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual atau kelompok. Kemitraan juga merupakan kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu kemitraan juga merupakan suatu upaya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai perwujudan dengan adanya komitmen bersama”

Jalinan kerja sama tersebut telah berjalan baik dan berdampak positif bagi kelancaran proses pembangunan di Kampung Asai. Namun sisi negatif yang mungkin muncul di masa mendatang adalah adanya penyalahgunaan Dana Kampung untuk memperkaya pihak-pihak tertentu meskipun hal tersebut belum terjadi hingga saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kampung (TA.PMD) program P3MD

“Menurut saya, Positifnya dengan hubungan yang mempunyai korelasi adalah dimana tingkat koordinasi sangat intensif dan dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga implementasi dan substansi undang-undang desa dapat berjalan dan sesuai dengan aturan yang ada. Negatifnya adalah kemungkinan masing-masing akan mempertahankan pendapatnya masing-masing”

Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) program P3MD.

juga menambahkan bahwa:

“Efek yang ditimbulkan dari pola hubungan kerja sama tersebut secara positif salah satunya adalah saling menunjang satu dengan yang lainnya juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam kemitraan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai subjek pembangunan guna mencapai tujuan kemitraan tersebut. Namun tidak dipungkiri ada pula kendala diantaranya Badan Pengelola yang belum efektif, tidak banyak pendonor yang memberi respon. Atau sisi negatif-nya adalah masih adanya penyalahgunaan kepercayaan yang telah dibangun dan penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu mitra yang terkait”

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat disimpulkan hubungan kerja sama dan kemitraan antar pihak yang terlibat dalam pembangunan Kampung Asai memberikan dampak positif, utamanya dalam hal komunikasi dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana kampung akan berjalan semakin baik jika ada sinergi positif antara organisasi yang berkepentingan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Permasalahan yang muncul hampir di seluruh kampung adalah penggunaan dana mayoritas untuk operasional aparatur desa. Pada aturan yang berlaku adalah maksimal sebesar 30%. Pada konteks penggunaan dana di Kampung Asai, penggunaannya juga melebihi batas maksimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bendahara Kampung Asai.

“Dari total pagu anggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah Rp. 600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah kampung adalah sebesar 53,84%”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, besaran dana kampung yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah Kampung Asai adalah sebesar 53,84% dan nilai tersebut terlampaui besar dan memiliki potensi penyelewengan. Potensi ini disadari oleh seluruh pemangku kebijakan, utamanya dalam penetapan harga. Hal ini sebagaimana

diungkapkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengungkapkan bahwa

“Saya kira ini merupakan hal yang baru jadi penyelewengan pasti ada bukan hanya kampung asai tapi semua kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, penyelewengan bisa terjadi dalam penetapan harga barang karena pemerintah daerah belum menetapkan standarisasi barang dan jasa bagi pemerintah kampung, sehingga terjadi penetapan harga yang bervariasi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain”.

Namun di sisi lain, pendapat di atas disanggah oleh pengelola dana kampung Kampung Asai yang menjelaskan bahwa masalah yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran dalam belanja sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kampung Asai berikut ini.

“Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan penyelewengan anggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan anggaran masih terjadi ergeseran dalam belanja sebagai contoh dalam belanja operasional perkantoran, ATK di dalam APBK nilainya 4 juta namun dalam pembelanjaan mencapai 6 juta sehingga mempengaruhi nilai belanja yang lainnya”.

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana belum mampu mengalokasikan anggaran dengan benar dan berpotensi melakukan penyelewengan yang merugikan banyak pihak di masa mendatang. Artinya karakteristik agen pelaksana di Kampung Asai pada saat ini adalah penghambat keberhasilan implementasi kebijakan dana kampung.

e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Para pemangku kepentingan, baik para aparatur desa maupun masyarakat umum secara nyata mendukung dan berkontribusi aktif dalam realisasi pembangunan di Kampung Asai. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut ini.

“Sumbangsih pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerja sama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerja sama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik”.

Berdasarkan pengamatan dari kondisi ekonomi, sejauh ini pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan pengelola belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program kegiatan di Kampung Asai.

f. Disposisi Implementator

Program kegiatan di Kampung Asai dijalankan oleh para pengelola dana kampung telah bekerja secara maksimal. Namun masih ada masalah, yaitu belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala yang berhubungan dengan urusan administratif.. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kampung

“program kegiatan di kampung asai dijalankan, para pengelola baik kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban penggunaan dana dana kampung” (hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai)

Jika ditinjau dari tingkat pemahaman, secara umum pengelola dana dana kampung telah memahami bahwa pengelolaan dana bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, anak bayi dan balita yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang baik bagi keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut ini.

“Pada umumnya pengelola dana Dana Kampung telah memahami pengelolaan dana yang bertujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung”.

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan disposisi implementator dana kampung di kampung Asai telah menunjukkan semangat yang tinggi dan pemahaman yang positif terkait dengan dana kampung. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi implementator yang positif akan mendukung kesuksesan implementasi kebijakan dana kampung.

C. Pembahasan

Besarnya anggaran dana kampung yang dialokasikan untuk Kampung Asai pada tahun 2015 dan 2016 telah mampu diserap dengan baik. Di buktikan dengan besaran anggaran belanja tidak jauh berbeda dengan besaran anggaran pendapatan yang diperoleh. Belanja desa dialokasikan pada beberapa sektor, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan untuk pembangunan sosial budaya masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan ekonomi. Menurut hasil penelitian sebesar 53,84% dari dana kampung digunakan untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Seluruh program kegiatan pada tahun anggaran telah mampu diselesaikan dengan baik dan di apresiasi, namun penulis menilai bahwa penggunaan dana lebih dari setengah

dana kampung untuk operasional aparatur kampung adalah suatu pemborosan yang tidak tepat penggunaan.

Menurut Edwards dalam Nawawi (2009), empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Pada konteks implementasi kebijakan dana kampung di Kampung Asai Distrik Windesi, keempat aspek tersebut telah di sinergikan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan dana kampung telah terimplementasi dengan baik. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan para informan, mekanisme yang berjalan sebelum pengalokasian dana kampung adalah pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) oleh pengelola yang kemudian di musyawarahkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (MUSREMBANG) dan akhirnya diperoleh kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan untuk satu tahun anggaran. Berdasarkan pengamatan penulis, keputusan tentang prioritas kegiatan tidak didasarkan pada analisis mendalam tentang kondisi yang berkembang di Kampung Asai maupun aspek sosio-ekonomi lainnya, maupun lebih didasarkan pada kemampuan pengelola dalam melaksanakan kegiatan.

Setelah rumusan prioritas kegiatan telah disahkan, maka pengelola akan melakukan proses pembangunan secara bertahap sebagaimana telah direncanakan. Pada praktiknya, terdapat kegiatan diluar rencana yang dilakukan oleh pengelola, seperti pemberian bantuan semen untuk pembangunan gereja dan pembuatan pipa air bersih di puskesmas pembantu. Menurut penulis, improvisasi yang dilakukan oleh pengelola patut di apresiasi

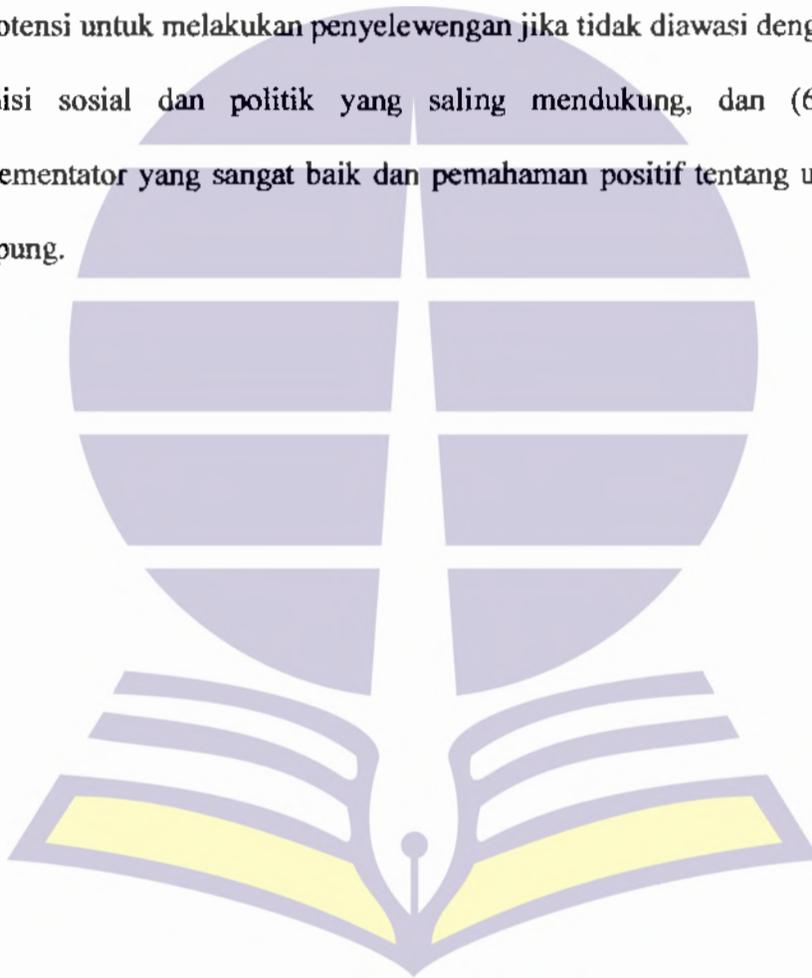
karena mampu melihat kondisi lingkungan dengan baik. Bantuan untuk gereja dan puskesmas pembantu secara langsung akan memperlancar kegiatan peribadatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pembangunan kampung yang telah direalisasikan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, utamanya dalam meningkatkan taraf hidup. Hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, pembangunan fisik yang telah berjalan adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan jalan rabat beton, dan pembuatan MCK yang layak. Kemudian dari pengadaan prasarana, pembelian motor tempel sebagai alat penunjang transportasi dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke kota, memuat hasil dagangan dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik yang dihasilkan adalah pemberian dana penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK, kepemudaan, dan kader posyandu. Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 yang memprioritaskan Dana Kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, *output* yang dihasilkan dari realisasi dana kampung di Kampung Asai telah sesuai dengan aturan tersebut.

Praktik pengelolaan dana kampung di Kampung Asai juga turut mewujudkan harapan pemerintah Provinsi Papua yang berusaha mencirikan kegiatan pembangunan pasca otonomi khusus tahun 2001 yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pengelola dana kampung yang mengedepankan sikap kekeluargaan dan adanya transparansi mendorong masyarakat untuk

berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan kampung, termasuk di dalamnya kaum adat, agama, dan perempuan.

Lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi implementasi dana kampung untuk pembangunan kampung Asai adalah (1) adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, serta disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, (2) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak perbaikan, utamanya dalam masalah LPJ (3) terjalin kerja sama yang baik antar organisasi pemerintahan di setiap level nya, (4) agen pelaksana yang kurang konsisten dan berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (5) kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (6) disposisi implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana kampung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai dinilai telah terealisasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 53,84% dari dana kampung digunakan untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi.
2. Ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai, yaitu (a) adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, serta telah disosialisasikan dengan baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak perbaikan, utamanya dalam masalah LPJ (c) terjalin kerja sama yang baik antar organisasi pemerintahan, (d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (e) kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana kampung.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Alokasi Dana Kampung sebaiknya lebih diprioritaskan pada pembangunan ekonomi masyarakat kampung dan perbaikan fasilitas kampung dalam bidang pembangunan, disamping itu perlu ada perhatian serius pemerintah daerah mengenai standarisasi Barang dan Jasa khususnya mengenai upah tenaga buruh pikul.
2. Guna memastikan akuntabilitas laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana kampung di kampung Asai dan menghindari keterlambatan pelaporan, diharapkan bagi pemerintah aparaturnya untuk memberikan pelatihan khusus dan pendampingan bagi pengelola atau menambahkan tenaga teknis yang mampu mengelola pelaporan dengan baik.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi tentang kebijakan dana kampung tidak hanya terhadap aparaturnya, namun kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan tersebut serta ikut mengawasi jalannya kebijakan dana kampung sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa dana kampung bukan untuk kepentingan pemerintah desa namun untuk kepentingan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. (2015) "Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa". Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20458-pengelolaan-keuangan-des-a-sistem-dan-prosedur-perencanaan-keuangan-des-a>. tanggal 31 Agustus 2017
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aji, B.P dkk. (2015). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng", e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 3 Tahun 2015)
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka setia.
- Barnabas, S. (2007). *Pembangunan Kampung: Membangkitkan Kekuatan Dahsyat Rakyat Papua*. Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua.
- Bastian, I. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basuki (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 1*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Bratakusumah, D.S & Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chalid, P. (2014). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta: Indeks
- _____. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
- Dwiansyah, S. (2016). "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015". JOM Fisip Vol. 3, No. 2 – Oktober 2016.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- Hambali dan Idris M. (2016). *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kodama
- Herdiannyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John, A.D.P. (2015). "Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Kampung di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang". *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1, Maret 2015.
- Keban, Y.T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia
- Kementerian Dalam Negeri. (2005). *Surat Edaran Mendagri 140/640/SJ Tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 Menurut Kabupaten/Kota*.
- Kharisma, V.D & Supranoto. (2013). "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Kampung". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 2: 94-103.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: MN.
- Nordiawan, D dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- _____. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga
- Ompi, A.W. (2013). "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (DANA KAMPUNG) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara)". *Jurnal Governance*, Vol. 5, No. 1.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwandari, E.K. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Prabawa, A. (2015). "Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3, (1), 227-238.
- Putra, C.K, dkk. (2013). "Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.
- Rahman, H. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita
- Perbup No. 4 Tahun 2015 dan Perbup 5 Tahun 2015
- Sahdan, G dkk. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Kampung*. Bandung: FPPD
- Sanusi dkk. (2014). "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (DANA KAMPUNG) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan". *eJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1732-1745
- Sanusi, B. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Segu, A.S. (2016). "Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat (Studi Tentang Penggunaan Alokasi Dana Kampung Muara Nyahing)". *eJournal Administrasi Negara*, 4 (1) 2016 : 2632 – 2646.
- Siagian, P.S. (2008). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soleh, C & Heru R. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.

- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka.
- Suparman, D.K, dkk. (2014). “Implementasi Program Alokasi Dana Kampung Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN.
- Sutiono. (2015). “Bagaimana Keuangan Desa Dikelola?”. diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20438-bagaimana-keuangan-desa-dikelola> tanggal 31 Agustus 2017
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Thomas. (2013). “Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 51-64.
- Tikson, D.T. (2005). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Umar, H. (2002). *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Utama, L.S. (2015). “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (DANA KAMPUNG) Dalam Penguatan Kelembagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Loteng)”. Media Bina Ilmiah. Vol I No. 1978-3787, 12-25

- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Wasistiono, S & Irwan T. (2007). *Prospek Pengembang Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Widjaja, H.A.W. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wisakti, D. (2008). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- BPS. (2016). "Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016". Diakses dari <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378>. 31 Agustus 2017
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



Lampiran I Panduan Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBANGUNAN KAMPUNG (STUDI KASUS PADA KAMPUNG ASAI DISTRIK WINDESI PERIODE 2015-2016)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG

Proses Implementasi Kebijakan

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung Asai? Bagaimana struktur organisasinya?
2. Bagaimanakah proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di kampung Asai? Siapa yang merencanakan?
3. Apakah hal tersebut berkaitan langsung dengan pencairan dana dana kampung?
4. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung Asai? Manakah yang paling diprioritaskan?
5. Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan rencana yang telah disusun sebelumnya?
6. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? Jika ada sebutkan dan jelaskan.
7. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban setelah realisasi dana kampung?
8. Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan?

Pencapaian Tujuan Kebijakan :

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan? Jelaskan
2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung? Baik fisik maupun non fisik
3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan (misal: musyawarah, kerja lapangan, pengawasan dll)

4. Jika tidak ada, siapakah pelaksana dana kampung di lapangan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
5. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi dana kampung di lapangan?
6. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? (aktif/pasif dll)
7. Bagaimana strategi pelaksana dana kampung untuk mendapatkan dukungan dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif?
8. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di kampung Asai

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Standar dan sasaran kebijakan

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan?
2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?
3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Anda?

Sumber daya

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah Anda?
2. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di wilayah Anda?
 - a. Pendidikan
 - b. Kecakapan (kompetensi)
 - c. Pengalaman
 - d. Keadministrasian
3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai?
4. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk pembangunan kampung Asai?

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut? (contoh: kantor desa, kendaraan, ATK dll)
6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan DANA KAMPUNG? (materiil dan non materiil)

Hubungan antar Organisasi

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung di kampung Asai bersama dengan pengelola lokal?
2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak?
3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan (positif atau negatif)

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional pemerintahan desa?
2. Mungkinkah ada penyelewangan penggunaan dana dana kampung oleh oknum pengelola?

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di kampung Asai menggunakan dana kampung?
2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di kampung Asai menggunakan dana kampung?
3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di kampung Asai sudah tepat dilakukan? Jika belum, apa yang lebih diprioritaskan?

Disposisi implementator

1. Menurut Anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung Asai telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati?
2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung di wilayahnya? Berikan contohnya

Lampiran II Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Asai

Nama Informan : Kundrat Raubia
Jabatan : Kepala Kampung Asai
Dinas/Instansi : Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1) Siapakah pengelola Dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur organisasinya?

Kepala kampung asai, bamuskam, rk, rt/rw, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan adalah pengelola dana Dana kampung.

2) Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan Dana kampung di kampung asai? Siapa yang merencanakan ?

- Kepala kampung dan aparat menyusun daftar usulan kegiatan dan membahasnya secara bersama – sama pada saat musrenbang di tingkat kampung.
- Dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Kampung 1 (satu) tahun di kampung asai selalu mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah kampung (rpjmk)

3) Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana Dana kampung ?

Program kegiatan yang bisa dibiaya oleh dana kampung akan di tandai dan program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daftar program kegiatan pada skpd terkait.

4) Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk Dana kampung di kampung asai ? Manakah yang paling di prioritaskan ?

Di kampung asai telah ditentukan 4(empat) program adalah :

1. Tenaga guru, tenaga medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang mendasar di kampung asai;

2. Rehabilitas mck di kampung asai;
 3. Talud pantai sepanjang 800 meter di kampung asai.
 4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) kampung asai
- 5) Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dana kampung dengan rencana yang telah disusun sebelumnya ?
- Penyusunan rencana Dana kampung berbeda atau belum sesuai dengan hasil kesepakatan bersama di karenakan dalam penyusunan rkp, rapbk masih menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di akomodir dalam pembelanjaan kampung.
- 6) Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? Pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung Asai (RKPK), diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan gedung gereja, penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu (pustu).
- 7) Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban setelah realisasi Dana kampung ?
- Setelah pencairan dana Dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam hal ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk membicarakan rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan.
- 8) Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan? Dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan dengan realisasi program kegiatan yang dikerjakan di tingkat kampung, kalau terdapat pekerjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat.

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan ?

Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi Dana kampung ? Baik fisik maupun non fisik

- a) Fisik

- Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan mck.

- b) Non fisik

- Pemberian dana penunjang kegiatan tim pengerak pkk, dana penunjang kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di kampung asai dalam menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita.

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai contoh di kampung asai adalah :

- 1) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digunakan untuk pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada tahun lalu.
- 2) Penunjang kegiatan pkk dapat digunakan untuk mengukur baju batik seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara – acara resmi pkk di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan (misal: musyawarah, kerja lapangan, pengawasan dll)

Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan Dana kampung di kampung asai

4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?

Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) tahun anggaran.

5. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?

Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Dan transparansi pemerintah kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati oleh masyarakat.

6. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di kampung asai?

Kendala – kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai antara lain :

1. Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau menuntut bayar dengan alasan yang tepat.
2. Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi pembangunan rumah, masih ada yang menuntut ongkos muat dengan alasan material non lokal yang terlalu banyak.

3. Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampaui dari apa yang telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung jawaban.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN SASARAN KEBIJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan ?

Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113 tahun 2014 bab iv pasal 12 sampai dengan pasal 19.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ?

Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, sehingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam penyampaian laporan spj.

SUMBER DAYA

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ?

Dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan pengelola Dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam pengelolaan Dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas sdm pengelola dana kampung di wilayah ada ?

- a. Pendidikan

Pengelola dana kampung di kampung asai rata2 berpendidikan paling rendah adalah smp dan sma.

- b. Pengalaman
Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran dalam kerja.
- c. Administrasi
Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan baik.
3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu 5 (lima) tahun yang sudah di muat dalam rpjnu-kampung.
4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk pembangunan kampung asai ?
Selain Dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan oleh pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek.
5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung realisasi Dana kampung di wilayah tersebut ?
Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, generator dll.
6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan dana kampung?
Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung di kampung asai bersama dengan pengelola lokal ?
- Pemerintah distrik windesi

2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ?
 - Pemerintah distrik setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan s/d pelaporan.

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

1. Berapa persen dari dana Dana kampung yang digunakan untuk operasional pemerintah desa?

Dari total pagu anggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah rp. 600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah kampung adalah sebesar 53,84 %.

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana dana kampung oleh oknum pengelola?

Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan penyelewengan anggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan anggaran masih terjadi pengereseran dalam belanja sebagai contoh dalam belanja operasional perkantoran, atk di dalam apbk nilainya 4.juta namun dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja yang lainnya.

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di kampung asai menggunakan dana kampung ?

Sumbangi pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Se jauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di kampung asai menggunakan dana kampung ?

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerjasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di kampung asai sudah tepat dilakukan ? Jika belum, apa yang lebih diprioritaskan

Se jauh ini pengalokasian Dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program kegiatan di kampung asai.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung asai telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati ?

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban penggunaan dana dana kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung di wilayahnya ? Berikan contoh

Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh :

- Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni.

Lampiran III Hasil Wawancara dengan Ketua Bamuskam Asai

Nama Informan : Benyamin Puari
Jabatan : Ketua Bamuskam Asai
Dinas/Instansi : Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur organisasinya?

Kepala kampung asai, aparat kampung dan pemangku kepentingan lainnya di kampung asai adalah pengelola dana kampung.

2. Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana dana kampung ?

Program kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana kampung akan di tandai dan program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daftar program kegiatan pada skpd terkait.

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung asai ? Manakah yang paling di prioritaskan ?

Di kampung asai telah ditentukan 4(empat) program adalah :

- a. Tenaga guru, tenaga medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang mendasar di kampung asai;
- b. Rehabilitasi mck di kampung asai;
- c. Talud pantai sepanjang 800 meter di kampung asai.
- d. Pembangunan pembangkit listrik tenaga micro hidro (pltmh) kampung asai

4. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?

Realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung asai (rkpk), diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan gedung gereja dan penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu (pustu).

5. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban setelah realisasi dana kampung ?

Setelah pencairan dana dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam hal ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk membicarakan rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan.

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan ?

Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? Baik fisik maupun non fisik

a. Fisik

- Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan mck.

b. Non fisik

- Pemberian dana penunjang kegiatan tim pengerak pkk, dana penunjang kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di kampung asai dalam menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita.

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai contoh di kampung asai adalah :

- 1) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digunakan untuk pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada tahun lalu.

- 2) Penunjang kegiatan pkk dapat digunakan untuk mengukur baju batik seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara – acara resmi pkk di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten.
3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan
- Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan Dana kampung di kampung asai
4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?
- Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) tahun anggaran.
5. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?
- Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup bergotong royong, serta transparansi pemerintah kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati oleh masyarakat.
6. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung Asai?
- Kendala – kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai antara lain :
- a. Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa berupa kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau menuntut bayar dengan alasan yang tepat.

- b. Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi pembangunan rumah, masih ada yang menuntut ongkos muat dengan alasan material non lokal yang terlalu banyak.
- c. Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampaui dari apa yang telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung jawaban.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN SASARAN KEBIJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan ?
Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113 tahun 2014 bab iv pasal 12 sampai dengan pasal 19.
2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ?
Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, sehingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam penyampaian laporan spj.

SUMBER DAYA

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ?
Dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan pengelola dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam pengelolaan dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas sdm pengelola dana kampung di wilayah ada ?
 - a. Pendidikan
Pengelola Dana kampung di kampung asai rata2 berpendidikan paling rendah adalah smp dan sma.
 - b. Pengalaman
Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran dalam kerja.
 - c. Administrasi
Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan baik.
3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurang waktu 5 (lima) tahun yang sudah di muat dalam rpjm-kampung.
4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk pembangunan kampung asai ?
Selain Dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan oleh pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek.
5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut ?
Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, generator dll.

6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan dana kampung?

Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung di kampung asai bersama dengan pengelola lokal ?
 - Pemerintah distrik windesi
2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ?
 - Pemerintah distrik setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan s/d pelaporan.

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional pemerintah desa?

Dari total pagu anggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah Rp. 600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah kampung adalah sebesar 53,84 %.
2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana dana kampung oleh oknum pengelola?

Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temnkan penyelewengan anggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan anggaran masih terjadi pengeseran dalam belanja sebagai contoh dalam belanja operasional perkantoran, atk di dalam APBK nilainya 4.juta namun dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja yang lainnya.

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Se jauh mana dukungan para aparat desa tentang realisasi pembangunan di kampung asai menggunakan dana kampung ?

Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Se jauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di kampung asai menggunakan dana kampung ?

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerjasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di kampung asai sudah tepat dilakukan? Jika belum, apa yang lebih diprioritaskan?

Se jauh ini pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program kegiatan di kampung asai.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di Kampung Asai telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati ?

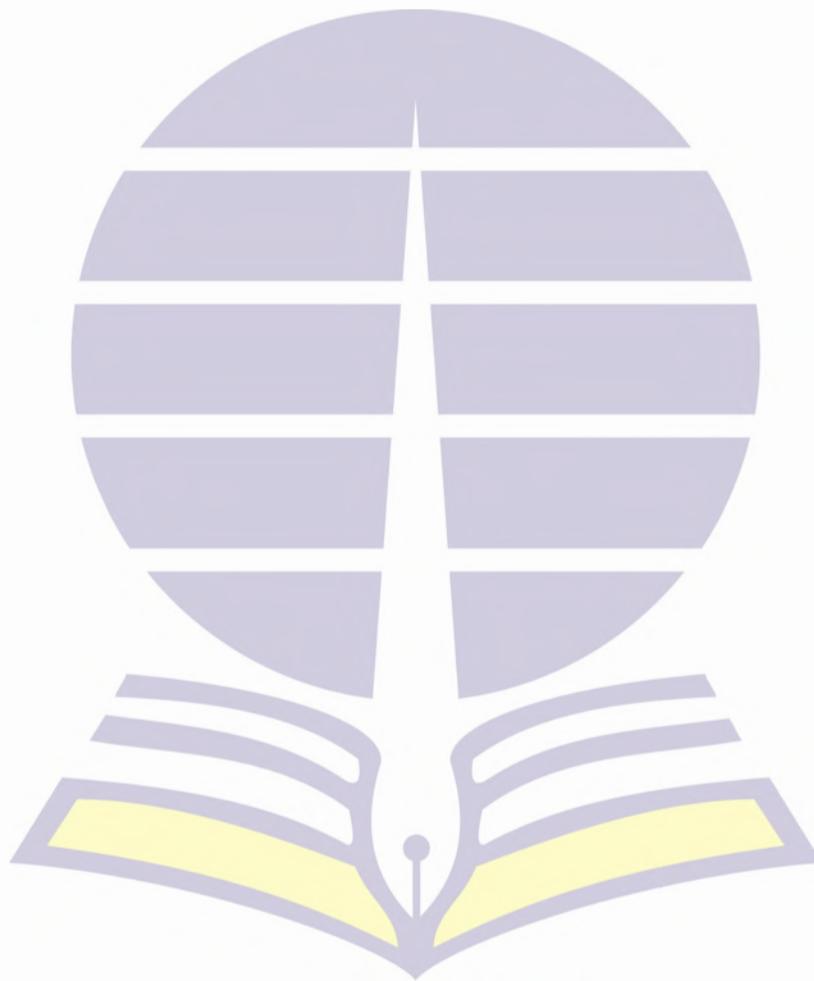
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban penggunaan dana dana kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung di wilayahnya ? Berikan contoh

Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh :

- Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni.



Lampiran IV Hasil Wawancara dengan Sekretaris Distrik Windesi

Nama : Aldius Evanlis Kanggunum, S.Stp
Jabatan : Sekretaris Distrik Windesi
Dinas/ instansi : Distrik Windesi

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Siapakah pengelola Dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur organisasinya?

Pengelola Dana kampung di kampung asai adalah kepala kampung, sekretaris kampung beserta seluruh aparat kampung, bamuskam beserta seluruh anggota bamuskam, tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan dan juga seluruh komponen masyarakat kampung asai, tentunya pemerintah distrik juga terlibat karena kampung asai merupakan wilayah yang tidak terlepas dari wilayah distrik windesi.

Dana kampung sebelum di kelola atau di gunakan sesuai dengan mekanisme penggunaannya dimusyawarahkan terlebih dahulu secara terbuka dengan melibatkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan diatas.

2. Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana kampung ?

Proses penyusunan Dana kampung di kampung asai itu sendiri dilandaskan berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 111, 112, 113 114 Tahun 2014, Permendes Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Bupati Kepulauan Yapen yang mengatur tentang penggunaan dana kampung., sehingga proses perencanaan dana kampung kampung asai di rencanakan dengan melibatkan kepala kampung, sekretaris kampung beserta perangkat kampung asai, bamuskam, tokoh agama, adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unsur sekolah yang ada di kampung asai beserta pemerintah distrik windesi selaku pengarah perencanaan agar proses perencanaan dana kampung di kampung asai sesuai

dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di Kampung Asai ? Manakah yang paling di prioritaskan ?

Di tahun 2016 kegiatan yang di usulkan dan merupakan prioritas pembangunan di kampung asai adalah pembangunan rumah masyarakat, pembangunan air bersih, hal ini di karenakan program kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat kampung asai.

4. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?

Pelaksanaan program kegiatan dana kampung pada kampung asai menurut pandangan kami sudah sangat baik dan tidak mengalami kesenjangan yang signifikan antara perencanaan yang di rencanakan dengan pembangunan yang dilaksanakan, hal ini terbukti dari program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan perencanaan serta kesepakatan bersama masyarakat dengan pemerintah kampung asai, seperti contohnya pembangunan rumah masyarakat yang diusulkan kegiatan tersebut itu juga yang dibangun, sehingga menurut pemngamatan kami proses perencanaan serta pembangunan di kampung asai setidaknya sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan didalam undang-undang tentang dana kampung.

5. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban setelah realisasi dana kampung ?

Kampung asai pada tahun 2016 proses pertanggung jawaban dana kampung yang telah digunakan jika dilihat dari laporan pertanggung jawabannya saya pikir sudah sangat baik, karena setelah penggunaan kepala kampung beserta sekretaris kampung dan bendahara langsung menyiapkan laporan pertanggung jawabannya sesuai juknis yang direkomendasikan dari kabupaten kepulauan yepen, meski masih terjadi keterlambatan waktu pelaporannya namun secara keseluruhan sudah sangat baik dilakukan oleh penanggung jawab dana kampung di kampung asai.

PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan ?

Berbicara maanfaat dari dana kampung kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat kampung khususnya di kampung asai saya pikir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena dengan adanya dana kampung ini maka proses pembangunan di kampung asai sangat menunjukkan proses peningkatan taraf hidup mulai dari persediaan perumahan masyarakat sampai pada pembangunan infrastruktur ekonomi dasar di kampung,

contoh yang paling kongkrit adalah masyarakat dapat membangun rumah yang layak untuk di huni dari dana kampung ini tanpa harus megeluarkan uang pribadi, sehingga uang pribadi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang lain, selain itu terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kampung asai, dengan adanya pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya maka tenaga kerja juga dibutuhkan dalam rangka pembangunan tersebut. Maka sudah barangtentu masyarakat setempat yang dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Sehingga tenaga kerja ini di honor dan mendapatkan uang di kampung serta tidak harus bersusah payah ke kota kabupaten untuk mencari kerja.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? Baik fisik maupun non fisik

Hasil-hasil dari realisasi dana kampung di kampung asai seperti yang saya sudah jelaskan di atas secara pembangunan fisik, namun ada pembangunan juga secara mental, dengan adanya dana kampung ini maka kagiatan pemuda pemudi baik di bidang seni budaya dan karajinan tangan yang bersifat tradisional dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mengurangi angka kejahatan di kampung. Pemuda-pemuda di kampung asai dapat menyalurkan bakat bola kaki melalui kegiatan bola kaki begitu juga kegiatn olahraga lainnya.

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan

Kontribusi BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan Dana kampung jika dilihat dari bentuk kegiatan seperti musyawarah, kerja lapangan dan pengawasan lembaga lembaga desa ini sangat memherikan kontribusi, karena dari pandangan kami di kampung asai, proses pelaksanaan Dana kampung itu sendiri merupakan hasil kerjasama yang baik dari setiap bahkan seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya lembaga-lembaga desa ini, hal ini dikarenakan jumlah penduduk asai yang tidak terlau banyak sehingga ketika ada kegiatan maka keterlibatan masyarakat maka didalamnya sudah terwakili komponen lembaga desa tersebut.

4. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi dana kampung di lapangan?

Pengawas proses Dana kampung pada kampung asai menurut kami jika dilihat dan didengar dari laporan masyarakat setempat jika ada keganjalan atau keterlambatan proses pencairan Dana kampung, biasanya nanti ada masyarakat yang datang ke distrik lalu melaporkan hal tersebut, ini membuktikan bahwa hampir seluruh warga masyarakat menjadi pengawas secara langsung di lapangan dalam proses realisasi dana kampung tersebut.

5. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?

Jika dilihat dari jumlah penduduk pada kampung asai yang tidak terlalu banyak sehingga kontribusi dari proses pembangunan yang bersumber dari Dana kampung hampir sebagian dari warga masyarakat kampung asai. Di satu sisi warga masyarakat sangat aktif dalam proses pembangunan di kampung asai.

6. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?

Dana kampung ini merupakan salah satu sumber pendapatan warga masyarakat di kampung asai, sehingga strategi yang paling baik untuk membuat pastisipasi

masyarakat secara aktif bagi pelaksanaan Dana kampung di kampung asai adalah dengan membuka peluang lapangan kerja bagi para warga masyarakat, dengan melibatkan secara langsung dalam proses pembangunan.

7. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung Asai?

Sebenarnya kendala yang dihadapi realisasi dana kampung pada kampung asai adalah proses pertanggung jawaban pelaksanaan dana kampung, karena dalam pembeljaan dan pembagunan menurut hemat saya sebagian tidak ada kendala yang terkendala adalah pembuatan laporan pertanggung jawabannya. Karena keterlambatan waktu penyerahan laporan akan berdampak besar bagi proses pencairan dana selanjutnya. Sehingga menurut kami hal itu yang menjadi kendala dari proses realisasi dana kampung. Selain itu satu hal yang tidak terlepas juga jarak antara kampung dan ibu kota kabupaten kepulauan yapen yang perjalanannya harus di tempuh dengan laut dan darat, yang mejadi kendala jika kondisi laut tidak bersahabat maka proses pembangunan bisa saja mengalami hambatan akibat kecelakaan laut yang dialami oleh para pengelola Dana kampung pada kampung asai.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDAR DAN SASARAN KEBIJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan?

Dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung sudah barangtentu ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana kampung.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?

Pelaksanaan dana kampung sebelum berjalan terlebih dahulu sudah dilaksanakan bimtek oleh pemerintah kabupaten kepulauan yapen dengan mendatangkan penyaji materi dari propinsi puaa bahkan dirjen pemerintahan

desa terkait penggunaan dana kampung, selain itu bagian pemerintahan kampung pada sekretariat daerah kabupaten kepulauan yapen, kepala bagian beserta para kasubbag selalu membuka ruang bagi para penanggung jawab dana kampung bahkan masyarakat kampung asai untuk terus berkoordinasi terkait pelaksanaan dana kampung, sehingga menurut kami pemerintah daerah sudah sangat membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dana kampung apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, berkaitan dengan hal itu, pemerintah distrik juga melalui kepala distrik dan kami selaku sekretaris distrik beserta seluruh pejabat eselon iv dan staf juga tidak menutup ruang bagi setiap kampung untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan dana kampung tersebut. Disamping itu pula di setiap distrik ditempatkan pendamping-pendamping kampung yang juga siap memberikan pendampingan bagi pelaksanaan dana kampung.

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Anda?

Penjelasan yang diberikan oleh setiap komponen pemerintah kabupaten kepulauan yapen, pemerintah distrik, bahkan pendamping kampung sudah sangat membantu dan tentunya sangat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di wilayah distrik windesi.

SUMBER DAYA

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah Anda?
Proses pemilihan pengelola Dana kampung di distrik windesi kita lakukan berdasarkan struktur organisasi kampung dan para pemangku kepentingan di tingkat kampung juga dilibatkan sesuai amanat undang-undang desa.
2. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di wilayah Anda?
Sumber daya manusia pengelolah dana kampung memang masih terbatas, sehingga dari keterbatasan itu menurut kami mereka masih harus dibekali dengan ilmu-ilmu bahkan pengetahuan tentang pengelolaan dana kampung.

Namun di sisi lain pemerintah kabupaten kepulauan yapen melalui bupati memberikan masukan khususnya bendahara kampung untuk sementara dikelola oleh pegawai negeri sipil yang berasal dari pemerintah distrik setempat seperti halnya distrik windesi bendahara kampung asai adalah pegawai distrik sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan bahkan pertanggung jawaban keuangan kampung secara baik.

3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai?

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan yapen, maka pemerintah kampung asai dalam proses perencanaan mengikuti arah kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan yapen yang di muat dalam RKPD, sehingga diharapkan pembangunan di kampung asai tidak terlepas dari apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan yapen.

4. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk pembangunan kampung Asai?

Selain Dana kampung ada sumber dana dari apbn yang masuk melalui rekening kabupaten yaitu dana prospek namun sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana prospek tersebut diperuntukan untuk membiayai ekonomi kemasyarakatan dan bukan untuk pembangunan fisik. Namun dana tersebut baru dicairkan anggarannya yaitu tahun anggaran 2015 dan penggunaannya ditahun 2016. Sehingga pada tahun berjalan ini yaitu 2016 dan masuk tahun 2017 proses pembangunan di kampung sangat bertitik beratkan pada dan kampung.

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut?

Fasilitas yang dimiliki kampung asai sudah sangat komplit hal ini dibuktikan dengan adanya kantor desa, kendaraan bermotor roda dua, komputer laptop dan atk yang di bebaskan atau di belnjakan pada tahun 2016. Sehingga dapat membantu proses pelaksanaan Dana kampung di kampung asai.

6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan dana kampung?

Sumbangsih warga masyarakat kampung asai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat besar terutama dari segi moril yaitu dengan keterlibatan secara langsung dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di kampung asai.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung di Kampung Asai bersama dengan pengelola lokal?

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung pada kampung asai dalah tentunya pemerintah kampung, bmskam, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan komponen masyarakat lainnya, pemerintah distrik windesi dan pemerintah kabupaten kepulauan yapen dalam hal ini asisten satu sekda dan bagian pemerintahan kampung skretariat daerah kabupaten kepulauan yapen selain itu juga pihak bank daerah papua yang mana merupakan komponen terpenting dari proses implementasi dana kampung pada kampung asai.

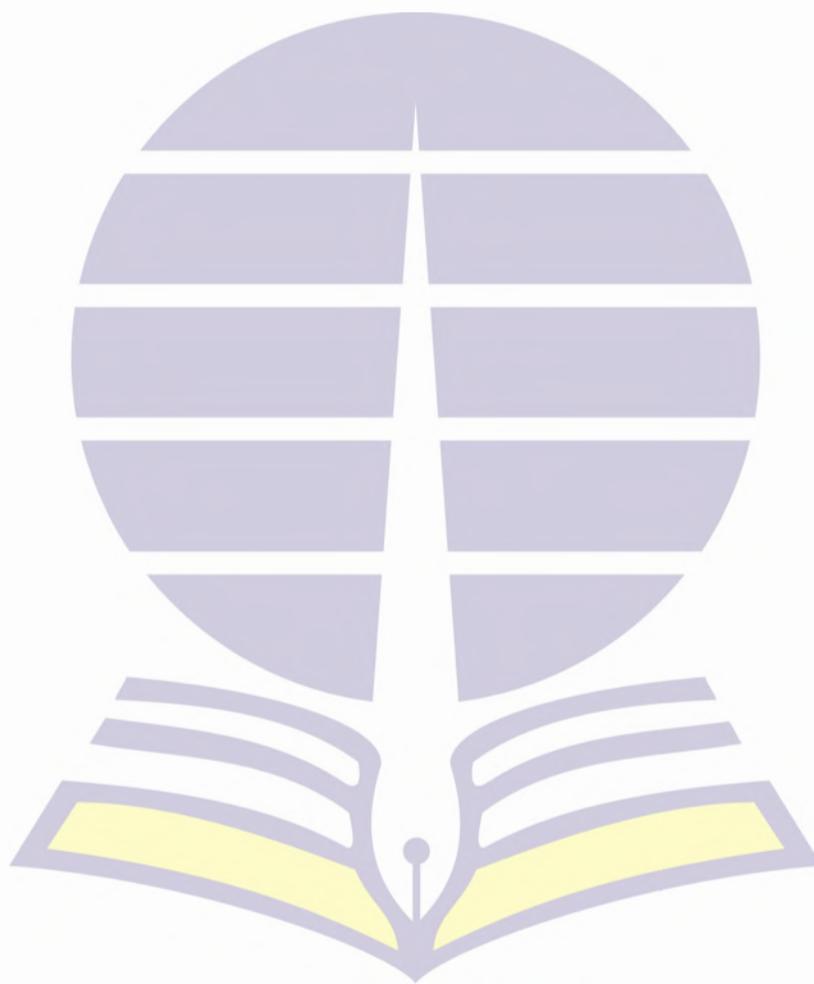
2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak?

Jika dilihat dari proses pencairan dana kampung tahun 2016, yang sudah berjalan dengan sangat baik mulai dari proses perencanaan, pencairan sampai pada proses pembangunan dan pertanggung jawaban, maka kesemuannya itu dapat berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari koordinasi serta peran pihak-pihak yang sudah di sebutkan pada point 1 di atas. Dan sudah tentunya ada koordinasi serta hubungan kerja yang terjalin antar semua pihak sehingga proses implementasi Dana kampung dapat berjalan dengan baik.

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan

Efek yang dihasilkan menurut kami dari hubungan baik tersebut antara pihak-pihak tersebut, tentunya banyak sisi positifnya yaitu proses pembangunan di kampung asai dapat berjalan dengan baik. Namun di sisi negatifnya di takutkan

ada kerja sama yang mengakibatkan penyalahgunaan dana kampung dapat di sembunyikan dan di atur dengan baik untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Namun dalam pelaksanaannya tahun anggaran 2016 tidak terdapat hal-hal negatif yang ditakutkan terjadi namun lebih dari itu hal positif dari proses impelmentasi dana kampung dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat kampung asai.



Lampiran V Hasil Wawancara dengan Bendahara Kampung Asai

Nama Informan : Anton Maniamboy, ST
Jabatan : Bendahara Kampung Asai
Dinas/Instansi : Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1) Siapakah pengelola dana kampung di Kampung Asai ? Bagaimana struktur organisasinya?

Pengelola dana kampung di kampung asai adalah Kepala Kampung Selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris Kampung Selaku pelaksana program kegiatan di kampung asai, namun dalam struktur pengawasan pembangunan semua pemangku kepentingan di kampung asai, baik Bamuskam RK, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dilibatkan secara langsung pada saat penggalan gagasan hingga sampai menentukan kegiatan yang akan di programkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2) Bagaimana Proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di Kampung Asai? Siapa yang merencanakan ?

- Kepala Kampung Asai dan Aparat menyusun daftar usulan kegiatan dan mem bahasnya secara bersama – sama pada saat musrenbang di tingkat kampung.
- Dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Kampung 1 (satu) tahun di kampung asai selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)

3) Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana dana kampung ?

Dalam kaitannya seluruh keputusan bersama yang telah diperkaya pada saat musrenbang tingkat kampung asai akan dikaji sehingga, program kegiatan yang bisa dibiaya oleh dana kampung akan di tandai dan program kegiatan

dalam skala menengah akan menjadi daftar program kegiatan pada SKPD terkait.

- 4) Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di Kampung Asai ? manakah yang paling di prioritaskan ?

Di Kampung Asai telah ditentukan 8 (delapan) program kegiatan namun yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan terdapat 5 (lima) program adalah:

1. Pembangunan Rumah Layak Huni yang di targetkan tahun 2021 masyarakat di kampung asai pada umumnya sudah memiliki rumah sendiri yang bersumber dari dana dana kampung;
2. Tenaga Guru, Tenaga Medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang mendasar di kampung asai;
3. Rehabilitas MCK di Kampung Asai;
4. Talud Pantai Sepanjang 800 Meter di Kampung Asai.
5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) Kampung Asai

- 5) Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan rencana yang telah disusun sebelumnya ?

Kadang dalam penyusunan rencana dana kampung berbeda atau belum sesuai dengan hasil kesepakatan bersama di karenakan dalam penyusunan RKP, RAPBK masih menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di akomodir dalam pembelanjaan kampung.

- 6) Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? Pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung Asai (RKPK), diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan gedung gereja, penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu (pustu).

- 7) Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban setelah realisasi dana kampung ?

Setelah pencairan dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam hal ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk membicarakan rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan.

- 8) Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan?

Dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan dengan realisasi program kegiatan yang dikerjakan di tingkat kampung, kalau terdapat pekerjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat.

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan ?

Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? baik fisik maupun non fisik

a) Fisik

- Hasil fisik yang sekarang telah dirasakan di kampung asai yaitu pengadaan motor tempel yang menjadi alat penunjang transportasi yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke kota, memuat hasil dagangan dan lain sebagainya
- Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan MCK.

b) Non Fisik

- Pemberian dana penunjang kegiatan Tim Pengerak PKK, Dana Penunjang Kegiatan Kepemudaan, Dana Penunjang bagi kader

posyandu di Kampung Asai dalam menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita.

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai contoh di kampung asai adalah :

- 1) Penunjang kegiatan kader di kampung asai serahkan langsung dalam bentuk dana sehingga dalam menjalankan kegiatan Pemberian Makanan tambahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.
 - 2) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digunakan untuk pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada tahun lalu.
 - 3) Penunjang kegiatan PKK dapat digunakan untuk mengukur baju batik seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara – acara resmi PKK di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten.
 - 4) Dana penunjang kegiatan kelembagaan adat di kampung asai
3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan
- Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan dana kampung di kampung asai
4. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi dana kampung di lapangan ?
- Dalam pelaksanaan kegiatan di kampung asai, baik mulai dari pengurusan pencarian dana di kabupaten sampai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di kampung menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kampung asai dalam mengawasi proses kelancaran realisasi belanja.

5. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?

Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) tahun anggaran.

6. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?

Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Dan transparansi pemerintah kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati oleh masyarakat.

7. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung Asai ?

Kendala – kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai antara lain :

- 1) Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau menuntut bayar dengan alasan yang tepat.
- 2) Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi pembangunan rumah, masih ada yang menuntut ongkos muat dengan alasan material non lokal yang terlalu banyak.
- 3) Kadang Kerja di lapangan berbeda dengan apa yang telah disepakati bersama dalam penyusunan RPJMK, RKPK dan APBK yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 4) Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampaui dari apa yang telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung jawaban.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN SASARAN KEBIJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan ?

Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113 Tahun 2014 Bab IV Pasal 12 sampai dengan pasal 19.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ?

Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, sehingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam penyampaian laporan SPJ.

SUMBER DAYA

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ?

dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan pengelola dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam pengelolaan dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di wilayah ada ?

- a. Pendidikan

Pengelola dana kampung di kampung Asai rata2 berpendidikan paling rendah adalah SMP dan SMA.

- b. Kecakapan

Memiliki wawasan yang baik dalam mengambil suatu keputusan yang tidak merugikan sesama.

c. Pengalaman

Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran dalam kerja.

d. Administrasi

Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan baik.

3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ?

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu 5 (lima) tahun yang sudah di muat dalam RPJM-Kampung.

4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk pembangunan kampung asai ?

Selain dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan oleh pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu PROSPEK.

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut ?

Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, generator dll.

6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan dana kampung?

Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung di Kampung Asai bersama dengan pengelola lokal ?
 - Pemerintah Distrik Windesi
2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ?
 - Pemerintah distrik Setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan s/d pelaporan.
3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut?

Dampak positifnya yaitu semua kampung dapat dikoordinir secara langsung di tingkat distrik dan dalam proses penyusunan RKP, APBK dan RPJMK dapat diselesaikan secara bersama-dan kolektif dalam pengurusan dana kampung.

Dampak negatifnya yaitu program usulan yang tidak tercover saat musrenbang tingkat kampung seperti perjalanan dinas luar daerah, pengadaan radio komunikasi diusul oleh pemerintah distrik untuk di akomodir dalam pembelanjaan.

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional pemerintah desa?

Dari total pagu anggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah Rp. 600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah kampung adalah sebesar 53,84 %.
2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana DANA KAMPUNG oleh oknum pengelola?

Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan penyelewengan anggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan anggaran masih terjadi pengereseran dalam belanja sebagai contoh dalam belanja operasional perkantoran, ATK Di dalam APBK nilainya 4.juta namun dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja yang lainnya.

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Se jauh mana dukungan para aparat desa tentang realisasi pembangunan di kampung asai menggunakan dana kampung ?

Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Se jauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di kampung asai menggunakan dana kampung ?

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan kerjasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di kampung asai sudah tepat dilakukan ? Jika belum, apa yang lebih diprioritaskan?

Se jauh ini pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program kegiatan di kampung asai.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung asai telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati ?

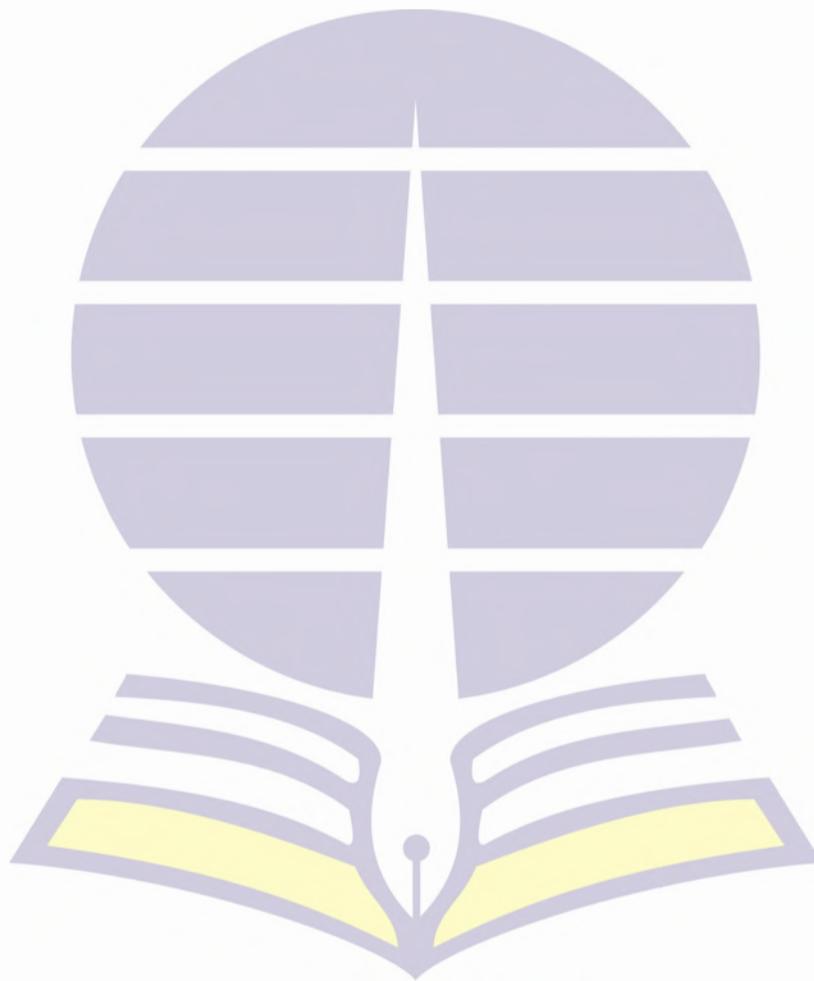
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban penggunaan dana dana kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung di wilayahnya ? berikan contoh

Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh :

- Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni.
- Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, anak bayi dan balita yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang baik di dalam keluarga.



Lampiran VI Hasil Wawancara dengan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Identitas Informan

Nama : Drs. Drofilus Yan Lestuni
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan
Dinas/ Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG

Proses Implementasi Kebijakan

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung Asai? Bagaimana struktur organisasinya?

Pengelola Dana kampung Pada 160 Kampung dan Khususnya kampung Asai adalah Kepala Kampung Dan perangkat Kampung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB III pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dimana PTPKD terdiri dari sekretaris selaku koordinator, kepala seksi sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara.

2. Bagaimanakah proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di kampung Asai? Siapa yang merencanakan?

Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Dana kampung disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrembang) yang mana dalam musrembang tersebut hadir seluruh Stakeholder (pemangku kepentingan) yang berada dikampung baik pemerintah kampung, Bamuskam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, tokoh Pemuda dan Warga masyarakat baik RT dan RW. Dalam Musrembang tersebut terjadi usulan-usulan kegiatan dari seluruh peserta musrembang sesuai dengan prioritas kegiatan dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Desa,

daerah tertinggal dan Transmigrasi. Jadi yang menyampaikan rencana kegiatan adalah peserta rapat tersebut yang kemudian dicatat oleh notulen dalam hal ini Kepala urusan program untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBK.

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung Asai? Manakah yang paling diprioritaskan?

Kegiatan yang diusulkan oleh setiap kampung tidak terkecuali kampung asai harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Prioritas Penggunaan Dana kampung pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

4. Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan rencana yang telah disusun sebelumnya?

harus sinkron antara program dan kegiatan yang disusun atau direncanakan dengan prioritas Penggunaan Dana kampung berdasarkan permendesa karena apabila tidak sesuai maka tim evaluasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah akan mengevaluasi dan mengoreksi rancangan Anggaran Belanja Kampung, apabila tidak sesuai pasti akan dicoret dan disesuaikan dengan petunjuk yang ada.

5. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? Jika ada sebutkan dan jelaskan.

Terkadang juga ada beberapa kampung di kabupaten kepulauan yapen yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan direncanakan, tetapi kampung asai dari data pertanggungjawaban yang dimasukkan pada Bagian Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Anggaran Belanja Kampung yang telah ditetapkan.

6. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban setelah realisasi dana kampung?

Ya, harus. Laporan pertanggungjawab harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan bahkan Sesuai dengan RAB yang sudah ditetapkan dengan

Peraturan Kampung. Karena apabila SPJ tersebut dimasukan maka kampung tersebut dapat mengusulkan Surat Perintah Pembayaran untuk Tahap berikutnya, jadi Laporan Pertanggung Jawaban sangat penting untuk dibuat dan dilaporkan apabila tidak maka Pemerintah Daerah akan melakukan pemeriksaan melalui SKPD Inspektorat.

7. Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan?

Laporan yang disampauikan oleh kampung-kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk kampung asai memang tidak tepat waktu karena hal ini terkendala proses pembuatan pertanggungjawaban termsuk bukti yang kurang lengkap.

Pencapaian Tujuan Kebijakan :

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan? Jelaskan

Dana kampung memberikan manfaat yang begitu besar bagi pemerintah kampung terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat karena prioritas dari Dana kampung adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, untuk itu pemerintah kampung harus bisa merencanakan penggunaan Dana kampung seoptimal mungkin sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan Dana kampung diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat karena ada 30 % untuk bidang pemerintahan diantaranya untuk belanja barang dan jasa, belanja modal tetapi juga dalam bidang pemberdayaan ada kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa maupun peningkatan kapisitas kelompok-kelompok masyarakat di kampung. khusus kampung asai dari hasil laporan kepala distrik dan dari hasil laporan pertanggungjawaban Dana kampung tahun 2015 dan tahun 2016 tahap 1 terlihat bahwa kualitas pelayanan pemerintah kampung terhadap sudah baik hal

ini terlihat dengan program kegiatan yang ditetapkan telah selesai dikerjakan dan adanya interaksi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung? Baik fisik maupun non fisik?

Realisasi Dana kampung yang dihasilkan dikampung asai adalah secara fisik bidang pembangunan adalah pembangunan rumah masyarakat, pengadaan motor tempel, Pembuatan Jembatan, Jalan Desa, Pelatihan Kepada Kader Posyandu, dan lain sebagainya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Standar dan sasaran kebijakan

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan?

Ya, dalam pengajuan Dana kampung setiap kampung harus harus memenuhi prosedur/persyaratan dengan mempersiapkan RPMJK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK (Rencana kerja Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung. persyaratan tersebut harus disampaikan kepada Kepada Pemerintah Daerah untuk dievaluasi (dikoreksi) apakah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK-07/2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015; Nomor 21 Tahun 2015; sedangkan pelaporan Dana kampung setiap kampung harus menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Dana kampung sesuai dengan APBK dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, serta harus melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan Realisasi Penggunaan Dana kampung, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Buku Bank Desa.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?

Sebenarnya Tugas pemerintah Daerah adalah memberikan penjelasan kepada setiap kampung tentang penggunaan Dana kampung berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, diman dalam peraturan tersebut dijelaskan Dana kampung desa diperuntukan untuk kegiatan apa saja yang pasti untuk membiayai Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Prioritas Pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan. Peraturan tersebut oleh pemerintah daerah melalui Bagian Pemerintahan Kampung telah mendistribusikan aturan tersebut kepada setiap kampung dan pemerintah Distrik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada setiap kampung untuk berkoordinasi dan berkonsultasi langsung dengan staf teknis pada Bagian Pemerintahan Kampung Setda kabupaten Kepulauan Yapen. Hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan kepada pemerintah kampung dalam hal ini pengelola keuangan kampung yaitu kepala kampung, ketua Bamuskam, Sekretaris kampung dan Bendahara Kampung, hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah Anda?

Ya, penjelasan yang diberikan harus dicermati dan ditindaklanjuti oleh masing-masing kampung dalam merencanakan kegiatan yang dibiayai oleh Dana kampung dengan memperhatikan kebutuhan prioritas pada masing-masing kampung sesuai dokumen musyawarah pembangunan kampung. dengan ketentuan bahwa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBK sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah kampung tersebut.

Sumber daya

1. Menurut Bpk, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung
Salah satu kendala dalam pengelolaan Dana kampung adalah masalah sumber daya manusia yang masih terbatas, dan berbeda antara kampung yang satu

dengan kampung yang lain. Terkadang pemerintah kampung menggunakan tenaga ex PNPM mandiri dalam tim pengelolaan keuangan kampung. salah satu upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu administrasi keuangan kampung kampung pada 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah mengangkat setiap bendahara kampung dari Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan Dana kampung merupakan hal yang baru dan muncul dipertengahan tahun 2015, sehingga harus dibutuhkan tenaga yang terampil dalam mengurus mengelolah dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan kampung, disamping itu juga untuk mengantisipasi kalau-kalau terjadi deviasi dalam pengelolaan Dana kampung oleh bendahara kampung, maka akan dilaksanakan pemotongan gaji terhadap bendahara yang mempergunakan Dana kampung tersebut. Memang tingkat pendidikan masyarakat yang ada dikampung rata-rata tamatan SMP dengan pengalaman yang minim untuk itu masih sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi pengelolah Dana kampung dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam merencanakan, mengelolah, membelanjakan dan mempertanggungjawabkan dana kampung.

2. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai?

Sebenarnya setiap pengelolah sudah tahu prioritas dari dana kampung karena telah dibagikan aturan tentang prioritas Dana kampung disamping disiapkan edaran dan pemberitahuan tentang Dana kampung serta adanya ruang konsultasi pada bidang tekbis yang menangani Dana kampung, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing kampung diluar dari prioritas Dana kampung.

3. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk pembangunan kampung Asai?

Ada, sumber dana lain yang dipergunakan untuk pembangunan kampung asai dan kampung-kampung lain yaitu dana prospek yang bersumber dari Provinsi Papua.

4. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut? (contoh: kantor desa, kendaraan, ATK dll)

Fasilitas pendukung masih minim, namun telah direncanakan dalam APBK kampung asai untuk dilaksanakan pengadaan dan Pembangunan Balai Kampung dalam tahun 2015.

5. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan dana kampung? (materiil dan non materiil)

Partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk non materiil yaitu menyiapkan tenaga dalam pembangunan kampung secara swakelola tetapi juga adanya swadaya masyarakat untuk menyiapkan bahan lokal berupa kayu, pasir dan batu yang akan dipergunakan dalam pembangunan kampung.

Hubungan antar Organisasi

4. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung di kampung Asai bersama dengan pengelola lokal?

Yang terlibat langsung dalam implementasi Dana kampung di kampung asai adalah Pemerintah kampung, Badan Musyawrah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan seluruh warga masyarakat.

5. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan (positif atau negatif)

Kampung asai adalah kampung yang menjunjung budaya saling menghargai dan menghormati sehingga efek dari hubungan ini adalah positif lewat hubungan ini terjadi interaksi yang harmonis antara Pemerintah kampung dengan BAMUSKAM maupun dengan Seluruh warga masyarakat.

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional pemerintahan desa?

Dana kampung khusus untuk bidang Pemerintahan dipergunakan sebesar 30 % dengan rincian, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Operasional Pemerintah Kampung, Operasional bamuskam dan Operasional RT dan RW

2. Mungkinkah ada penyelewangan penggunaan dana kampung oleh oknum pengelola?

Saya kira ini merupakan hal yang baru jadi penyelewangan pasti ada bukan hanya kampung asai tapi semua kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, penyelewangan bisa terjadi dalam penetapan harga barang karena pemerintah daerah belum menetapkan standarisasi barang dan jasa bagi pemerintah kampung, sehingga terjadi penetapan harga yang bervariasi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di kampung Asai menggunakan dana kampung?

Aparatur pemerintah kampung sangat mendukung dan terlibat langsung melalui partisipasi pembangunan kampung.

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di kampung Asai menggunakan dana kampung?

Masyarakat subyek dan objek dari pembangunan dan sudah barang tentu masyarakat akan terlibat langsung mendukung pembangunan kampung.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di kampung Asai sudah tepat dilakukan? Jika belum, apa yang lebih diprioritaskan?



Saya pikir Dana kampung dalam penetapannya oleh Pemerintah sudah memperhitungkan segala sesuatu yang positif dan negatifnya pelaksanaan Dana kampung tersebut. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa pengalokasian Dana kampung sudah tepat pada kampung asai dan 160 kampung lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen karena hanya Dana kampung yang dapat mengakomodir segala kebutuhan dari masing-masing kampung, apabila berharap dari Dana APBD Kabupaten Kepulauan Yapen maka saya rasa akan susah memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kampung asai. Saya rasa seluruh kampung/desa diseluruh Indonesia harus bersyukur kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bpk Presiden yang telah memberikan Dana kampung melalui APBN yang langsung dikirim masuk ke rekening kampung dan selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing kampung. Sekali lagi Dana kampung sudah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan kampung.

Disposisi Implementator

1. Menurut Bpk, apakah para pengelola dana kampung di kampung Asai telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati?

Dari laporan yang disampaikan oleh kepala distrik bahwa kampung asai merupakan salah satu kampung di distrik Windesi yang melaksanakan APBK dengan baik dan sepenuh hati dan sukses dalam pembangunan kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung di wilayahnya? Berikan contohnya

Ya. Ini terbukti dengan pengelola merencanakan Dana kampung mulai dari musyawarah (Musrembang) menyusun RKPK, RAPBK melakukan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Kampung dan membelanjakan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan. Contoh berdasarkan musyawarah menetapkan pembangunan jalan kampung maka pengelola membelanjakan Dana sesuai dengan RAB jalan kampung dan bersama masyarakat mengerjakan pembangunan jalan kampung.

Lampiran VII Hasil Wawancara Dengan P3MD

Nama : FRANS JERYS

Jabatan : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA.PMD)

Dinas/Instansi : Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pencapaian Tujuan Kebijakan

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi Dana kampung, utamanya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan Pelayanan? Jelaskan

Tentunya sangat besar sekali manfaat yang diperoleh setelah adanya Dana kampung yang langsung dikelola oleh Pemerintah Desa itu sendiri dalam hal ini Pemerintah Desa yang ada di Distrik Windesi, dimana kewenangan desa langsung di urus oleh Pemerintahan desa itu sendiri, apalagi berkaitan dengan alokasi 30% untuk kegiatan Bidang Pemerintahan Desa. Akan tetapi berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah secara kualitas maupun kuantitas. Dapat diambil satu kasus dimana masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintahan desa yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat, disamping itu kualitas SDM aparatur pemerintahan desanya juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang merasa terpenggil untuk meningkatkan efesiensi dan memperbaiki prosedur kerja, ada kecendrungan aparat pemerintah desa mempertahankan status quonya (arogansi) sehingga menimbulkan presepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang berbelit-belit disamping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau golongan tertentu (ikatan keluarga) hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan mengenai penggunaan Dana kampung yang masih kurang melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didesa, sehingga pemanfaatan Dana kampung yang harusnya tepat sasaran berubah menjadi

kebutuhan individu kelompok atau golongan tertentu, idealnya pemerintahan desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan bukan kepada golongan tertentu (ikatan keluarga).

2. Berdasarkan Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan dari hasil evaluasi dan pengamatan, apa yang telah dihasilkan dari realisasi Dana kampung tersebut? Baik fisik maupun non fisik

a. Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2015

Dari hasil laporan realisasi Dana kampung tahun 2015 dapat dilihat dari realisasi perbidang kegiatan sebagai berikut, data ini secara keseluruhan untuk kabupaten kepulauan yapen:

Secara keseluruhan kabupaten kepulauan yapen menerima alokasi Dana kampung bersumber dari dana APBN tahun 2015 sebesar Rp. 42.916.868.000,- yang diperuntukan untuk 160 desa yang teregistrasi di kementerian desa adapun rincian per bidangnya sebagai berikut;

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 19.875.938.200,- atau sebesar 46.31% dari total dana.

Adapun kegiatannya adalah pembangunan kantor kampung, balai kampung, adapula untuk operasional aparatur pemerintah kampung, mamuskam, serta rw dan rt serta kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas kantor desa seperti atk dll

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 15.254.945.600,- atau sebesar 35.55% dari total dana

Adapun kegiatannya adalah pembangunan pasar kampung, jalan kampung, pendidikan (beasiswa, pengadaan seragam sekolah, kelengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan posyandu, makanan bagi balita dan ibu2), pengadaan motor jhonson 15pk untuk nelayan, kelengkapan nelayan, adapula pengadaan bahan bangunan rumah, pembuatan jembatan, tambatan perahun, jalan rabat beton, jalan titian, gorong-gorong, dan drainase.

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 3.239.205.800,- atau sebesar 7.55% dari total dana

Adapun kegiatannya antara lain sebagai berikut; pembinaan seni budaya, seni pahat, keagamaan, dan tarian tradisional.

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 4.351.056.600,- atau sebesar 10.14% dari total dana

Adapun kegiatannya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu pkk seperti kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lainnya, disamping itu pelatihan-pelatihan untuk nelayan, pertanian, kesehatan, dan pelatihan peningkatan ekonomi seperti (SPP dan UEP) serta modalnya

- 5) Biaya Tak Terduga Rp. 195.721.800,- atau sebesar 0.46% dari total dana
Adapun kegiatannya sebagai berikut; kebanyakan desa belum mengetahui apa yang di maksud dengan biaya tak terduga sehingga peruntukannya hanya untuk menampung alokasi dana yang tidak bias didanai sehingga mereka lebih cenderung mengantisipasi dana tersebut untuk kegiatan luar biasa (force majuer) seperti bencana alam dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya peruntukannya tidak jelas.

b. Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2016

Dari hasil laporan realisasi Dana kampung tahun 2016 dapat diliat dari realisasi perbidang kegiatan sebagai berikut, data ini secara keseluruhan untuk kabupaten kepulauan yapen:

Secara keseluruhan kabupaten kepulauan yapen menerima alokasi Dana kampung bersumber dari dana APBN tahun 2016 sebesar Rp. 96.273.040.000,- yang diperuntukan untuk 160 desa yang teregistrasi di kementerian desa adapun rincian per bidangnya sebagai berikut;

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 25.346.477.700,- atau sebesar 26.33% dari total dana

Adapun kegiatannya adalah pembangunan kantor kampung, balai kampung, adapula untuk operasional aparatur pemerintah kampung, mamuskam, serta rw dan rt serta kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas kantor desa seperti atk dll

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 36.985.583.600,- atau sebesar 38.42% dari total dana

Adapun kegiatannya adalah pembangunan pasar kampung, jalan kampung, pendidikan (beasiswa, pengadaan seragam sekolah, kelengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan posyandu, makanan bagi balita dan ibu2), pengadaan motor jhonson 15pk untuk nelayan, kelengkapan nelayan, adapula pengadaan bahan bangunan rumah, pembuatan jembatan, tambatan perahun, jalan rabat beton, jalan titian, gorong-gorong, dan drainase.

- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 14.008.944.600,- atau sebesar 15.55% dari total dana

Adapun kegiatannya antara lain sebagai berikut; pembinaan seni budaya, seni pahat, keagamaan, dan tarian tradisional.

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 18.114.816.100,- atau sebesar 18.22% dari total dana

Adapun kegiatannya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu pkk seperti kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lainnya, disamping itu pelatihan-pelatihan untuk nelayan, pertanian, kesehatan, dan pelatihan peningkatan ekonomi seperti (SPP dan UEP) serta modalnya

3. Apakah pelaksanaan Dana kampung sejauh ini dari hasil evaluasi yang dilakukan khusus pada distrik windesi sudah berjalan dengan baik?

Untuk pelaksanaan Dana kampung di distrik windesi sudah berjalan baik, tetapi masih banyak catatan-catatan yang perlu dibenahi khususnya pelaksanaan Dana kampung itu sendiri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dituangkan didalam dokumen rpjmk nya, ataukah dokumen rpjmk tersebut hanya dibuat sebagai dasar untuk melakukan pencairan dan penyaluran Dana kampung, sering kali kami mendapatkan laporan bahwa peruntukan Dana kampung tidak jelas kegiatannyapun tidak jelas karena samasekali tidak ada musyawarah untuk pelaksaan musrembang sesuai dengan Permendagri no.114

4. Apakah ada koordinasi dari BAMUSKAM dan Masyarakat atau Lembaga Desa lainnya dalam Pelaksanaan Dana kampung? Jika ada jelaskan (Misal. Musyawarah, kerja lapangan, pengawasan, dll)

Dalam hal ini sama sekali belum kelihatan adanya korelasi hubungan kelembagaan yang jelas yang ada dikampung, peranan Bamuskam sendiri samasekali tidak ada hanya sebatas Bamuskam terkadang kepala desa sendiri sama sekali tidak melibatkan lembaga-lembaga lain yang ada dikampung dalam hal ini musyawarah kampung untuk merencanakan bersama pembangunan kampung, terkesan bahwa semuanya dilakukan oleh kepala kampung sendiri, misalnya hal terpenting sekali dalam pelaksanaan musrembang desa apakah sudah dibentuk tim perumus untuk penyusunan dan penetapan dokumen rpjmk, saya sendiri belum melihat hal itu dilaksanakan dikampung, padahal itu sangat penting sekali sehingga keterlibatan masyarakat tidak Nampak bahkan lebih parah lagi tidak dilibatkan sama sekali, jika kita melihat hanya dokumen rpjmk dan rkp saja yang ada tetapi prosesnya tidak ada.

5. Menurut pendapat bapak, sejauh mana pelaksanaan kebijakan Dana kampung berdampak pada peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan?
- Dampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan, menurut saya masih jauh dari harapan seperti saya sampaikan diawal bahwa sama sekali belum kelihatan jelas tugas dan fungsi utama dari aparaturn pemerintahan kampung, lebih cenderung kearah birokrasi yang tidak jelas, hubungan antar kelembagaan juga tidak jelas korelasinya masih kurang.
 - Dampak pada pembangunan, menurut saya sudah baik karena kebijakan Dana kampung adalah untuk memperkuat kemampuan keuangan desa, disamping itu untuk memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan, untuk mendorong terciptanya demokrasi desa, untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataanya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

- c. Dampak pada pelayanan kemasyarakatan, menurut saya masih sangat rendah secara kualitas maupun kuantitas. Dapat diambil satu kasus dimana masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintahan desa yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat, disamping itu kualitas SDM aparatur pemerintahan desanya juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja, ada kecenderungan aparat pemerintah desa mempertahankan status quonya (arogansi) sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang berbelit-belit disamping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau golongan tertentu (ikatan keluarga)

Faktor Penilaian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana kampung

Faktor Sumber Daya

1. Menurut pendapat bapak, sejauh mana kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa sebagai pelaksana kebijakan Dana kampung?

Menurut saya kualitasnya masih jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pengetahuan aparat desa mengenai Dana kampung, serta aturan-aturan dan perundang-undangannya, terkesan hanya jalan tanpa arah dan tujuan yang jelas, sebagai contoh hubungan kelembaggan yang tidak ada korelasinya, tingkat pendidikan yang minim bahkan ada yang tidak bisa membaca dan menulis, serta tingkat pemahaman yang masih kurang, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan Dana kampung itu sendiri, yang terpenting adalah profesionalisnya belum ada. seharusnya idealnya kualitas SDM aparat desa sesuai dengan undang-undang desa no.6 tahun 2014 dapat bekerja lebih profesional, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola administrasi baik itu keuangan maupun yang lainnya bisa berjalan lebih baik, termasuk hubungan kelembagaan,

pembangunan, dan pelayanan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah.

2. Seberapa memadai ketersediaan fasilitas-fasilitas (sarana-prasarana) yang mendukung kebijakan Dana kampung?

Menurut saya sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada sudah memadai khususnya kantor kampung, akan tetapi fungsi dari fasilitas sarana prasarana yang ada tidak digunakan sebaik mungkin, aktifitas-aktifitas yang ada dan harus dilaksanakan malah tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada, misalnya untuk pelayanan urusan KTP saja kantor kampung tidak difungsikan, lebih banyak langsung ke distrik atau kabupaten, dalam implementasi undang-undang desa terutama Dana kampung sendiri malah kantor desa sudah berpindah ke ibu kota kabupaten, kenapa begitu karena dengan akses yang begitu jauh, disamping itu untuk melakukan proses pencairan dari segi administrasi juga harus dilakukan di ibu kota kabupatensalah satu factor penghambat aktifitas didesa adalah tidak tersedianya sarana penerangan yang cukup memadai untuk menunjang aktifitas kantor kampung.

3. Apakah sumber daya pelaksana Dana kampung pada distrik windesi sudah memenuhi tentang proses dan penggunaan Dana kampung baik tahun 2015 dan 2016?

Menurut saya belum memadai, karena aparat pengelola Dana kampung sendiri belum memahami dan mengerti tentang implementasi undang-undang desa sendiri, proses dan mekanismenya bagaimanapun mereka belum mengetahui dan mengerti, apalagi tentang regulasi-regulasi yang harus dibuat oleh aparatur pemerintahan desa itu sendiri, sehingga substansi pelaksanaanya tidak terukur dan jelas.

4. Menurut anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola Dana kampung Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) diwilayah anda?

a. Pendidikan

Menurut saya pendidikan masih rendah karena paling rendah ada yang bersekolah hanya sampai tingkat sekolah dasar, parahnya lagi bahkan ada

yang tidak bisa membaca dan menulis, untuk yang tingkat pendidikannya lebih tinggi sudah baik tetapi perlu pemahaman yang lebih lagi tentang regulasi implementasi Dana kampung sesuai dengan undang-undang desa no.6 tahun 2014.

b. Kecakapan (Kompetensi)

Menurut saya masih kurang, perlu adanya pelatihan-pelatihan secara kontinyu agar terjadi peningkatan kapasitas aparat kampung itu sendiri

c. Pengalaman

Menurut saya berbicara tentang pengalaman semua aparat desa mempunyai pengalan tentang pengelolaan keuangan, akan tetapi berbicara tentang aturan (regulasi) pengalamannya masih kurang karena mereka sama sekali belum ada pelatihan peningkatan kapasitas untuk penyamaan persepsi mekanisme pengelolaan dan pelaporan administrasi baik keuangan maupun pertanggungjawaban, kebanyakan laporan dibuatkan (dibantu) orang yang lebih paham dan mengerti.

d. Keadministrasian

Manurut saya masih sangat kurang karena masih banyak yang belum memahami administrasi-administrasi apa saja yang mendukung pelaksanaan Dana kampung, bahkan regulasi (aturan) saja mereka belum paham dan mengerti.

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi Dana kampung pada setiap kampung di wilayah kabupaten kepulauan yapen

Menurut saya kendala-kendalanya sbb;

- a. Tingkat pemahaman dan pengertian yang masih rendah, hal ini dipengaruhi dari factor pendidikan yang mimim.
- b. Profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sebagai aparat pemerintah desa
- c. Kondisi wilayah
- d. Administrasi dan birokrasi yang terlalu banyak dan panjang
- e. Belum adanya pendampingan (pendamping baru ada per November 2016)
- f. Kondisi politik

- g. Aturan (regulasi) yang berbelit-belit terkait mekanisme penyaluran Dana kampung yang diatur oleh pemerintah pusat

Standard dan Sasaran Kebijakan

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan?

Jelas harus ada karena semua sudah diatur didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, permendagri no.113 tentang laporan administrasi desa, perubahan pertama perturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana kampung yang bersumber dari apbn, peraturan pemerintah no.22 tahun 2015 penganggaran Dana kampung dalam apbn, perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, peraturan pemerintah no.8 tahun 2016, permendagri no.37 tahun 2007 tentang pedoman mengelola keuangan desa, permendagri no.32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi pengelolaan keuangan desa, SKB 3 Menteri (mendagri, menkeu, mendes PDPT) tahun 2015 tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana kampung

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?

Menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini satker P3MD yang menagani Dana kampung sudah sangat baik dalam menjelaskan dan menyampaikan prosedur penggunaan Dana kampung, akan tetapi semua itu masih belum maksimal, perlu adanya sosialisasi yang kongkrit dalam hal in adanya semiloka kabupaten tantang pelaksanaan undang-undang desa agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan (regulasi) yang telah ditetapkan. Tambahan harus ada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan undang-undang desa, perlu pula adanya bimtek atau palatihan penguatan kapasitas aparat desa dalam melaksanakan administrasi dan pelaporan keuangan Dana kampung.

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan diwilayan anda?

Menurut saya harus sesuai karena disamping ada regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, dan harus pula didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hubungan Antar Organisasi

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi Dana kampung, adakah hubungan koordinasi dengan Bamuskam, pemerintah distrik, dan pendamping lokal desa selama ini?

Semua pihak harus terlibat mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, dan desa, disamping itu didukung pula oleh lembaga-lembaga desa serta menggunakan pola pendampingan melalui pendamping Dana kampung. Selama ini yang saya lihat belum nampak adanya korelasi hubungan antara bamuskam, pemerintah distrik dan pendamping, hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang baik mengenai fungsi dan peranannya dalam implementasi pelaksanaan Dana kampung.

2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak?

Menurut saya saat ini masih jalan masing-masing, jadi belum nampak kerja sama yang terjalin, hal ini mungkin dipengaruhi factor kepala distrik dari birokrasi sedangkan pendamping organisasi yang diatur dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, seharusnya ada korelasi hubungan yang baik dan sejalan agar dapat melaksanakan implementasi undang-undang desa sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan positif atau negative?

Menurut saya, Positifnya dengan hubungan yang mempunyai korelasi adalah dimana tingkat koordinasi sangat intensif dan dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga implementasi dan substansi undang-undang desa dapat berjalan dan sesuai dengan aturan yang ada

Negatifnya adalah kemungkinan masing-masing akan mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Berapa persen dari Dana kampung yang digunakan untuk bidang pemerintahan desa terutama untuk operasional pemerintahan desa?

Untuk tahun 2015 sebesar 46.31% dari total Dana kampung sumber APBN

Untuk tahun 2016 sebesar 26.33% dari total Dana kampung sumber APBN

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dari Dana kampung oleh oknum pengelola / Pemerintah desa?

Menurut saya sangat mungkin terjadi karena adanya beberapa factor yang sudah saya jelaskan diatas, untuk mengatasi hal ini perlu adanya pengawasan, pemantauan, dan bimbingan dari pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun distrik melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, perlu di ingatkan dan ditekankan kepada aparatur pemerintahan kampung untuk proses transparansi pengelolaan Dana kampung harus selalu disosialisasikan melalui papan informasi yang ada didesa, walaupun belum ada harus diadakan.

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

1. Sejauh mana dukungan para aparatur pemerintahan desa tentang realisasi pelaksanaan bidang pembangunan di desa menggunakan Dana kampung?

Menurut saya sudah sangat baik hal ini dapat dilihat bahwa peruntukan bidang pembangunan sangat besar dikabupaten kepulauan yapen untuk dua tahun anggaran sendiri sangat besar untuk tahun 2015 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 15.254.945.600,- atau sebesar 35.55% dari total dana sedangkan untuk tahun 2016 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 36.985.583.600,- atau sebesar 38.42% dari total dana.

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di distrik windesi serta kampung-kampung diwilayah distrik windesi menggunakan Dana kampung?

Menurut saya tentunya pasti sangat besar dimana alokasi dana yang digunakan cukup besar pula untuk pembangunan dimana untuk tahun 2015 sebesar Rp.

130.000.000,- dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.320.327.900,- ada peningkatan dari tahun pertama ke tahun kedua.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian Dana kampung pada kampung-kampung di distrik windesi sudah tepat dilakukan? Jika belum apa yang lebih diprioritaskan?

Menurut saya sudah tepat dan harus lebih difokuskan pada peningkatan ekonomi desa melalui BUMDES

Disposisi implementator

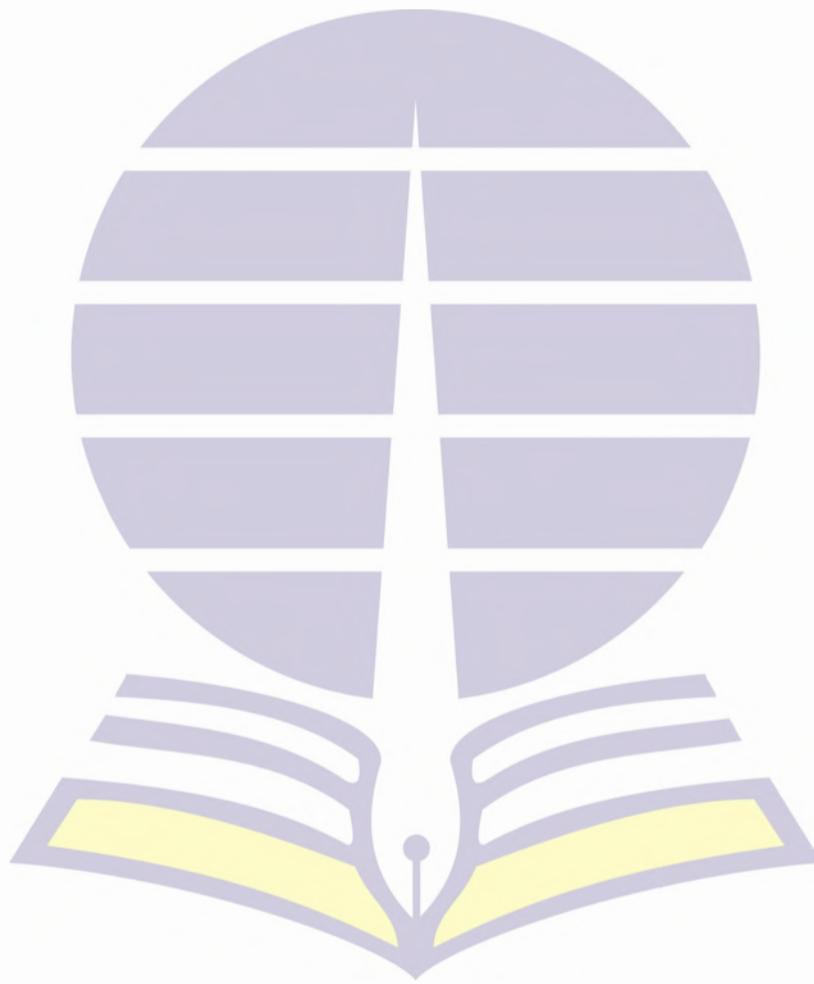
1. Menurut anda, apakah para pengelola Dana kampung dikabupaten kepulauan yapen telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati?

Menurut saya sudah, hal ini dapat dilihat dari kesiapan alokasi dana bersumber apbn, dan apbd kabupaten, dan mereka bekerja tanpa dukungan dana operasioanl dalam rangka mengawal implementasi Dana kampung yang seharusnya ada dan dialokasikan melalui apbd kabupaten, hal ini perlu karena untuk mengawal Dana kampung yang sangat besar perlu adanya pengendalian dan pengawasan ke desa-desa, saya berharap pengelola yang ada dikabupaten kepulauan yapen dalam hal ini Kabag Pemerintahan Desa selaku satker P3MD Kabupaten kepulauan yapen dapat terus membantu masyarakat, jalur birokrasi yang cukup panjang harus dicarikan solusinya agar dapat berjalan cepat, tepat dan sesuai dengan harapan. Disamping itu saya berharap harus ada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan setiap awal tahun agar pelaksanaan implementasi undang-undang desa dapat berjalan dengan baik dan proses transparansi pengelolaan dapat diterapkan sehingga korelasi antar kelembagaan desa dapat berjalan dengan baik tujuan dari Dana kampung dapat tercapai, perlu pula adanya pelatihan-pelatihan atau bimtek yang diadakan di kabupaten mengenai system pengelolaan keuangan dan administrasi pelaporan Dana kampung secara continue.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi Dana kampung diwilayahnya?

Menurut saya sudah sangat jelas memahami maksud dan tujuan dari Dana kampung, meskipun kadang terkendala dengan pemahaman apat desa yang sangat kurang, untuk itu perlu sebagai aparat pemerintah daerah melakukan

sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa, hubungan kelembangaan antas OPD dan Lembaga Masyarakat desa juga perlu dijaga agar implementasi undang-undang desa dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan tentunya memenuhi visi dan misi kabupaten kepulauan yapen.



Lampiran IX Hasil Wawancara dengan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Nama : VECKY ALLAN M

Jabatan : Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD)

Dinas/Instansi : Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN :

1. Manfaat yang diperoleh dari realisasi pelaksanaan Dana kampung walaupun secara umum belum maksimal namun cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kampung saat ini; terutama jika berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan. Karena pada hakekatnya pelayanan (pelayanan publik) merupakan kewajiban pemerintah (pemerintahan kampung) yang harus diberikan kepada masyarakat, karena sebaliknya bagi masyarakat, merupakan sebuah hak untuk memperoleh pelayanan oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan2 dasar masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik dari pelaksanaan dana kampung yang dilaksanakan oleh pemerintahan kampung. Beberapa contoh pelayanan pemerintahan kampung kepada masyarakat adalah dengan memfasilitasi pertemuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi/ usulan kebutuhan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti menggunakan Dana kampung, seperti pembangunan paud, pustu pasar kampung, balai kampung dan lai-lain yang merupakan bentuk kegiatan sarana prasarana (fisik), begitu pula dengan kegiatan non-fisik lainnya seperti pelatihan2 peningkan kapasitas kelembagaan masyarakat dll yang mana kesemuanya itu sebagai penunjang pelayanan pemerintah kepada masyarakat..
2. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, secara umum Dana kampung TA. 2015 dan 2016 di distrik windesi digunakan untuk pengadaan Motor tempel 15PK dan pembangunan 5 unit rumah layak huni. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik, beberapa yang kami wawancarai, mereka / masyarakat

mengatakan masih kurang jelas/ mereka tidak mengatahuinya akibat masih kurangnya transparansi dari aparat pemerintah kampung.

3. Menurut pengamatan yang kami lakukan termasuk mewawancarai beberapa masyarakat, dapat kami simpulkan mengenai pelaksanaan Dana kampung di Distrik Windesi bisa dikatakan “lumayan” / belum maksimal, ini kami katakan dikarenakan msh ada beberapa warga yang masih mengeluhkan menyangkut transparansi / keterbukaan dari aparat pemerintah kampung / pengelola kegiatan dana kampung.
4. Di Distrik Windesi khusus BAMUSKAM sangat berperan dalam memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Dana kampung, mulai dari membantu pemerintah kampung memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah kampung, membantu kepala kampung menyusun, membuat dan menetapkan peraturan kampung serta juga mengawasi pemerintah kampung dalam pelaksanaan Dana kampung. Masyarakatpun tidak luput dalam memberikan kontribusi pada pelaksanaan Dana kampung. Beberapa contoh diantaranya masyarakat pemilik hak adat/ulayat, seringkali memberikan pelepasan sebagian hak tanahnya bagi pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan fasilitas fisik/ sarana prasarana kampung dari Dana kampung. Juga masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk lain yaitu terlibat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
5. Dampak pelaksanaan kebijakan Dana kampung pada peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat besar karena ini dapat dilihat sejak berjalannya Program Dana kampung, Pemerintahan Desa makin terlihat “hidup” / aktif, semakin berdemokrasi (walau belum maksimal), dalam menjalankan amanat undang-undang desa demi mensejahterakan masyarakat.

KEBIJAKAN DANA KAMPUNG FAKTOR SUMBER DAYA

1. Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), secara umum kampung-kampung yang berada jauh dari daerah kota masih memiliki kekurangan pada kualitas Sumber Daya Manusianya. Dan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan Dana kampung. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah.
2. Hal berikut yang juga menjadi penghambat kebijakan dana kampung setelah masalah SDM adalah masalah fasilitas (sarana-prasarana) pendukung bagi aparat pemerintah kampung yang masih kurang memadai. Ini mengakibatkan para aparat pemerintah kampung lebih banyak menghabiskan waktunya di kota untuk mengerjakan hal2 yang mengenai administrasi. mulai dari fasilitas penerangan (listrik) yang kurang memadai (jika ada, tidak selalu beroperasi), juga mengenai transportasi yg jarang / bahkan tidak ada yang reguler antara kampung ke kabupaten untuk berproses.
3. Secara garis besar sumber daya pelaksanaan Dana kampung pada Distrik windesi sudah memahami proses dan penggunaan Dana kampung, walau memang pada kenyataannya, didalam pelaksanaan / prakteknya seratus persen. Terutama pada tahun pertama (2015), masih terlihat banyak kekurangan pemahaman yang masih kurang, tetapi pada tahun berikutnya (2016) hal ini makin membaik, mulai adanya peningkatan pemahaman dalam tentang proses dan penggunaan dana kampung.
4. Menurut saya SDM pengelola Dana kampung di wilayah saya (yang mana saya kebetulan berada di tengah kota), SDM pelaku/pengelola Dana kampung lumayan baik. Ini dapat dilihat dari bebrapa faktor seperti tingkat pendidikan yang baik/cukup dibanding para pelaku yang berada di kampung2 yang jauh dari daerah kota. Berikut para pelaku diwilayah saya lebih baik dalam hal percakapan, ini dikarenakan faktor pendidikan dan juga pola pikir para pelaku daerah kota yang lebih maju. Juga masalah pengalaman, beberapa dari mereka para pelaku mempunyai pengalaman2 sepadan dengan tugas yang diemban saat

ini, contohnya ada yang sebelumnya berasal / pernah bekerja di program PNPM Mandiri Repek, / prospek dan program2 serupa lainnya. Namun agak sangat disayangkan jika kita berbicara mengenai Keadministrasian, karena hal ini masih merupakan salah satu hal yang masih kurang dan hampir terjadi di sebagian besar kampung. Hal ini dipengaruhi oleh mental dan kedisiplinan pelaku yang masih sangat perlu tuk dibina dan diperbaiki.

5. Berbicara mengenai kendala realisasi Dana kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen masih sangat banyak, selain masalah akses transportasi dan komunikasi yang masih kurang, sebagaimana kami utarakan diatas; mulai SDM, Fasilitas /sarana prasana pendukung dll. Namun ada juga hal yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dana kampung adalah masalah kesadaran dan kepedulian baik dari masyarakat juga dari aparat pemerintah kampung, begitu pula partisipasi masyarakat yang masih kurang, serta masih kurangnya transparansi mengenai penggunaan dana kampung oleh pemerintah kampung/ pengelola mulai dari perencanaan hingga laporan penggunaan dana kepada masyarakat. Dan hal ini berada ditangan pelaksana/ pengelola Dana kampung (aparat pemerintah Kampung) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini kepada pemerintah kampung, dan juga BAMUSKAM yang masih kurang melakukan perannya sebagai pengontrol / bisa dibilang sebagai "DPR" nya kampung.

FATOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Standar dan sasaran kebijakan.

1. Dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung sudah menunjukkan adanya prosedur yang harus dilakukan; hal ini dikarenakan Dana kampung memiliki dasar hukum dan peraturan2 yang sangat jelas yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam setiap proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Dana kampung mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaporan.
2. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat walau saya nilai belum maksimal, namun telah memberikan penjelasan2 mengenai

mana yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan kepada seluruh aparat pemerintahan kampung agar selain pada pelaksanaannya tidak keluar dari rambu2/ aturan yang berlaku.

3. Mengenai apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak, hal ini itu sangat relatif jika kita berbicara soal kebutuhan. Namun yang terpenting disini adalah apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pada dasarnya sangat diharap keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam implementasi Dana kampung, namun jika dilihat secara umum, pihak2 yang terlibat langsung dalam imlementasi Dana kampung antara lain mulai dari :
 - a. Pemerintah Pusat (Kementerian terkait)
 - b. Pemerintah Propinsi
 - c. Pemerintah Kabupaten
 - d. Pemerintah Kampung (Kepala Desa)
 - e. BPD
 - f. Kepala Dusun
 - g. Perangkat Desa
 - h. Unsur LMD
 - i. Unsur Kelembagaan Desa
 - j. Pendamping Desa (TA, PD, PLD)
 - k. Pihak ketiga (kontraktor/swasta)
 - l. Suplayer (Pihak Toko)
 - m. Dan pihak2 lainnya

2. Pola Hubungan / kerjasama yang terjalin antara pihak2 terkait/ yang terlibat dalam implementasi dana kampung secara umum sangat luas, namun jika bisa dipersempit ke beberapa pola sebagai berikut adalah 1. Pola hubungan yang dilakukan berdasarkan peran wilayah/ posisi / kedudukan (jabatan). 2. Pola hubungan yang yang berbentuk "**kemitraan**" yang pada hakekatnya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara

individual atau kelompok. Kemitraan juga merupakan kerjasama formal antara antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu kemitraan juga merupakan suatu upaya kolaborasi antara antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai perwujudan dengan adanya komitmen bersama.

3. Efek yang ditimbulkan dari pola hubungan kerjasama tersebut secara *positif* salah satunya adalah saling menunjang satu dengan yang lainnya juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam kemitraan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai subjek pembangunan guna mencapai tujuan kemitraan tersebut. Namun tidak dipungkiri ada pula kendala diantaranya Badan Pengelola yang belum efektif, tidak banyak pendonor yang memberi respon. Atau sisi *negatif*-nya adalah masih adanya penyalahgunaan kepercayaan yang telah dibangun dan penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu mitra yang terkait.

KARATERISTIK AGEN PELAKSANA

1. Besar alokasi Dana kampung Bidang Pemerintahan Kampung untuk operasional pemerintahan kampung adalah sebesar 30% dari total alokasi dana kampung/tahun anggaran.
2. Menyinggung soal apakah mungkin adanya penyelewengan dana kampung oleh oknum pengelola/pemerintahan kampung, hingga saat ini hangat dibicarakan dan juga beberapa diantara sudah menjadi temuan yang memastikan bahwa hal itu benar2 terjadi hampir disemua tempat (kampung).

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI.

1. Mengenai dukungan aparat pemerintah kampung baru bisa dikatakan belum maksimal karena seperti kami sebutkan diatas masih belum adanya koordinasi yang baik antar aparat yang mana menimbulkan saling kurang kepercayaan. Juga belum adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang merata antar aparatur (monopoli tugas).

2. Mengenai dukungan masyarakat, sebenarnya masyarakat sangat mendukung pembangunan yang dihasilkan dari program dana kampung, namun yang masih menjadi kendala / hambatan adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan masalah transparansi/ keterbukaan dari aparatur pemerintah kampung kepada masyarakat.
3. Berbicara mengenai pengalokasian dana kampung terkait kondisi ekonomi saat ini didistrik windesi kami nilai sudah tepat dan itu bisa dilihat dari pengadaan motor tempel bagi nelayan di keseluruhan kampung guna peningkatan penghasilan demi menunjang/ meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun adapula hal2 yang harus diperhatikan sebelum pengadaan, yaitu mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ini bagi kelompok nelayan sebagai modal awal / bekal pengetahuan sebelum adanya pengadaan mesin/motor tempel tersebut. Karena hingga saat ini nelayan yang ada disini masih menggunakan cara2 tradisional dan bersifat konsumtif.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut kami para pengelola dana kampung di kabupaten kepulauan yapen belum bekerja maksimal dan belum dengan sepenuh hati, terutama yang berada di tingkat kampung. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya penyalahan prosedur dan masih adapula penyelewangan dana yang dilakukan oleh oknum2 aparat kampung.
2. Pada dasarnya secara garis besar para pengelola dana kampung telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung walau belum maksimal. Namun jika belum berjalan dengan lancar itu diakibatkan kurang adanya kesadaran / kepedulian dari aparat pemerintah kampung dalam hal ini para pengelola dana kampung.